

**PENGARUH KOMPETENSI PERANGKAT DESA, PARTISIPASI
MASYARAKAT DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
(STUDI KASUS DESA DI KECAMATAN KETANGGUNGAN
KABUPATEN BREBES)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Oleh :

SELINDA RAHMAINDAH

1805046114

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4(empat) sks

Hal : Naskah Skripsi

A.n.Sdri Selinda Rahmaindah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Selinda Rahmaindah

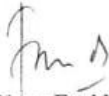
NIM : 1805046114

Judul : Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Partisipasi Masyarakat dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing I



Dessy Noor Farida, SE, M.Si, AK CA

197912222015032001

Pembimbing II



Naili Sa'adah, SE, M.Si, AK CA

198803312019032012



PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : **Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa Partisipasi Masyarakat dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes)**
Penulis : Selinda Rahmaidah
NIM : 1805046114
Jurusan : S1 Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah diujikan dalam sidang *munaqosyah* oleh Dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo dan dinyatakan LULUS dengan predikat Cumlaude pada tanggal:

14 Maret 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 14 Maret 2022

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang,

Dessy Noor Farida, S.E, M.Si, AK.CA
NIP. 197912222015032001

Sekretaris Sidang,

Naili Sa'adah, S.E, M.Si, AK.CA
NIP. 198803312019032012

Penguji Utama I,

H. Khoirul Anwar, M.Ag.
NIP. 196904201996031002

Penguji Utama II,

Firdha Rahmiyanti, M.A
NIP. 199103162019032018



Pembimbing I,

Dessy Noor Farida, S.E, M.Si, AK, CA
NIP. 197912222015032001

Pembimbing II,

Naili Sa'adah, S.E, M.Si, AK, CA
NIP. 198803312019032012

MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman”

(QS.Ali-Imron :139).

"Pendidikan itu bukan sebuah produk seperti gelar, diploma, pekerjaan, atau uang yang dihasilkan, pendidikan itu suatu proses yang tak akan pernah berakhir." (Bel Kaufman)

PERSEMBAHAN

Sebagai bentuk ucapan terimakasih, saya persembahkan karya kecil ini untuk orang-orang yang telah memberi dukungan dan doa demi kelancaran penulisan skripsi ini, terkhusus kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta Rasdum dan Komsiroh yang selalu mengasihi dan mencintai saya dengan setulus hati. Yang tiada hentinya memberikan dukungan dan doanya baik berupa materi maupun nonmateri.
2. Partner saya tersayang Agung Setiawan yang rela bolak balik Brebes-Semarang dari awal kuliah saya sampe dengan penyelesaian tugas akhir saya dan yang rela mengorbankan segalanya untuk kepentingan saya.
3. Keluarga besar saya yang telah memberikan doa dan dukungannya.
4. Teman-teman saya tercinta AKS C terkhusus Saniya Salsabilla dan Siti Lu'lu'uz Zakiya yang telah memberikan motivasi dan semangat serta menemani saya dari awal masuk kuliah sampai dengan sekarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan. Demikian deklarasi ini penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang, 19 Febuari 2022

Deklarator

Selinda Rahmaidah

NIM 1805046114

TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan proses pengalihan dari suatu huruf ke huruf lain. Dalam penulisan skripsi, proses transliterasi menjadi hal yang sangat penting karena didalamnya terkandung istilah arab yang harusnya ditulis huruf arab menjadi huruf latin. Oleh karena itu, transliterasi perlu ditetapkan untuk menjamin konsistensi penulisan skripsi yaitu sebagai berikut :

A. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	‘	16	ط	Thh
2	ب	B	17	ظ	Zh
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ts	19	غ	Gh
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Dz	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	Sh	29	ي	Y
15	ض	Dl			

Hamzah (ء) yang letaknya di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ditengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Vokal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

C. Diftong

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اَوَّ	Fathah dan wau	Au	A dan U

D. Syaddah (*Tasydid*)

Transliterasi dalam tulisan arab dilambangkan dengan konsonan ganda atau pengulangan huruf dan huruf yang mempunyai tanda *Tasydid*.

Contohnya : النَّاس : *Annas*

E. Kata Sandang

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al*-... misalnya النَّاس = *an-nnas*, Al ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada awal kalimat.

F. Ta'Marbuthah

1. Apabila dimatikan atau mendapat harakat sukun di akhir kata transliterasinya harus ditulis dengan huruf h.

Contoh: عائشة : *Aisyah*

2. Apabila dihidupkan dengan cara dirangkai dengan kata lain atau mendapat harakat fathah, kasrah, dhammah, transliterasinya harus ditulis t.

Contoh: زكاة الفطر : *zakatul-fitri*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kompetensi perangkat desa, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jumlah responden atau pihak pengelola dana desa sebanyak 63 responden yang terdiri dari Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Lebe Desa pada masing-masing desa yang berada di Kecamatan Ketanggagn. Pengumpulan data menggunakan data primer melalui penyebaran kuisisioner yang kemudian di proses dan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah teknik *Purposive Sampling* yaitu pengambilan sampel kepada responden yang sengaja dipilih dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Variabel partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dan variabel sistem pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dan desa. Di dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan diantaranya menghasilkan R square hanya 27,5%, variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya mencakup tiga variabel independen dan satu variabel dependen, serta objek yang digunakan terbatas hanya satu Kecamatan di Kabupaten Brebes.

Kata Kunci : Kompetensi Perangkat Desa, Partisipasi Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of village apparatus competence, community participation and internal control system on the accountability of village fund management. This type of research is quantitative research with the number of respondents or village fund managers as many as 63 respondents consisting of the Village Head, Village Secretary and Lebe Desa in each village in Ketanggungan District. Data collection uses primary data through the distribution of questionnaires which are then processed and analyzed using multiple linear regression analysis. The method used in sampling is a purposive sampling technique, namely taking samples from respondents who are deliberately selected and meet predetermined criteria.

The results of this study indicate that the village apparatus competency variable has a positive effect on the accountability of village fund management. The community participation variable has a positive effect on the accountability of village fund management. And the internal control system variable does not have a positive effect on management and village accountability. In this study, there are several limitations including producing an R square of only 27.5%, the variables used in this study only include three independent variables and one dependent variable, and the object used is limited to only one sub-district in Brebes Regency.

Keywords : *Village Apparatus Competence, Community Participation, Internal Control System, Village Fund Management Accountability.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul *“Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Partisipasi Masyarakat dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes).”* Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benerang.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan program studi Strata 1 Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan untuk itu segala kritik dan saran sangat dibutuhkan penulis demi kesempurnaan skripsi ini.

Pelaksanaan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Dr. Ratno Agriyanto, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Dessy Noor Farida, SE, M.Si, AK CA selaku Dosen Pembimbing I dan Naili Sa'adah, S.E, M.Si, AK selaku Dosen Pembimbing II.
5. Seluruh Dosen Jurusan Akuntansi Syariah dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat saat menempuh Studi di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

6. Seluruh Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Lebe Desa di Kecamatan Ketanggungan yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di Desa tersebut.
7. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah khususnya kelas AKS C yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.
8. Semua pihak yang belum tercantum dalam skripsi ini karena peneliti tidak dapat menyebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan dukungannya baik secara materi maupun non materi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih atas segala doa dan dukungannya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua pihak yang telah berkontribusi dengan ikhlas akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Akhir kata saya ucapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, 19 Febuari 2022

Selinda Rahmaidah

1805046114

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Kerangka Teori	11
2.1.1 Teori <i>Agency</i>	11
2.1.2 Pertanggungjawaban	12
2.1.3 Kompetensi	14

2.1.4	Partisipasi.....	18
2.1.5	Sistem Pengendalian Internal	21
2.1.6	Akuntabilitas	27
2.1.7	Pengelolaan Dana Desa.....	32
2.2.	Penelitian Terdahulu	38
2.3.	Rumusan Hipotesis Penelitian	42
2.4.	Kerangka Pemikiran Teoritik.....	46
BAB III METODE PENELITIAN		50
3.1.	Jenis Penelitian.....	50
3.2.	Populasi dan Sampel	50
3.3.	Sumber Data dan Teknik Pengelolaan Data	52
3.4.	Variabel dan Indikator Penelitian	53
3.5.	Teknik Analisis Data.....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		64
4.1.	Gambaran Umum Objek Penelitian	64
4.2.	Deskripsi Data.....	66
4.3.	Teknik Analisis Data.....	67
4.4.	Uji Kualitas Data.....	68
4.4.1	Uji Validitas	68
4.4.2	Uji Reabilitas	71
4.5.	Uji Asumsi Klasik.....	72
4.5.1	Uji Normalitas.....	72
4.5.2	Uji Heteroskedastitas.....	72
4.5.3	Uji Multikolinieritas.....	73
4.6.	Uji Hipotesis	74
4.6.1	Uji Regresi	74
4.6.2	Uji T	75
4.6.3	Koefisien Determinasi.....	76
4.7.	Pembahasan.....	77

BAB V PENUTUP	82
5.1. Kesimpulan	82
5.2. Saran	83
5.3. Keterbatasan Penelitian.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	128

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Anggaran Dana Desa	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	38
Tabel 3.1 Variabel dan Indikator	56
Tabel 4.1 Distribusi Kuisisioner	65
Tabel 4.2 Kategori Jenis Kelamin Responden	66
Tabel 4.3 Kategori Pendidikan Responden	66
Tabel 4.4 Kategori Jabatan Responden	67
Tabel 4.5 Hasil Uji Deskriptif	67
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas	69
Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas	71
Tabel 4.8 Hasil Uji <i>Kolmogorov Smirnov</i>	72
Tabel 4.9 Hasil Uji Heterokedastistas	73
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinieritas	73
Tabel 4.11 Hasil Uji Regresi	74
Tabel 4.12 Hasil Uji T	76
Tabel 4.12 Koefisien Determinasi.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teoritik	46
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuisisioner Penelitian	95
Lampiran 2 Dokumentasi Pengisian Kuisisioner.....	103
Lampiran 3 Jawaban Responden.....	106
Lampiran 4 Hasil Output SPSS Statistik Deskriptif	114
Lampiran 5 Hasil Output SPSS Uji Validitas	116
Lampiran 6 Hasil Output SPSS Uji Reliabilitas	126
Lampiran 7 Hasil Output SPSS Uji Asumsi Klasik.....	128
Lampiran 8 Hasil Output SPSS Uji Hipotesis	129

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Desentralisasi adalah proses pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Salah satu contoh bentuk desentralisasi di Indonesia sendiri seperti pelimpahan kekuasaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan dari Daerah kepada Desa. Adapun tujuan proses desentralisasi adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di suatu negara¹. Menurut Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 desa merupakan sekumpulan masyarakat yang memiliki batas wilayah dan kekuasaan untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri, kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang berlaku dan disahkan oleh Pemerintahan Indonesia².

Menurut Peraturan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Tahun 2015 menjelaskan bahwa kebijakan pelimpahan wewenang kepada desa secara otonom bertujuan untuk meletakkan pondasi pembangunan dimulai dari tingkat desa yang mana dapat dilihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang mengandung amanat untuk membangun Indonesia dari pinggiran serta memperkuat daerah dan desa³. Dalam pasal 71 sampai dengan 75 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 mengenai keuangan desa yang mengatur sumber keuangan desa salah satunya adalah dana desa, pemerintah mengalokasikan

¹ Sarifudin Mada, Lintje Kalangi, and Hendrik Gamaliel, 'Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing 'Goodwill'*, 8.2 (2017), 106–15 <<https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>>.

² Nur Ida Yesinia, Norita Citra Yulianti, Dania Puspitasari, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana desa*, *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, Vol.10, No. 1, 2018, h.105-112.

³ Suci Atiningsih and Aulia Cahya Ningtyas, 'Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali)', *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10.1 (2019), 2015–19.

dana desa melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/ kota kemudian kabupaten mengalokasikan kepada setiap desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan setiap desa⁴. Berikut anggaran dana desa dari tahun 2017-2019 :

Tabel 1.1
Anggaran Dana Desa

Tahun	Anggaran
2017	60 Triliyun
2018	60 Triliyun
2019	70 Triliyun
2020	72 Triliyun
2021	72 Triliyun

Sumber : www.kemenkeu.go.id

Tabel 1 menjelaskan bahwa pemerintahan menyediakan anggaran dana desa untuk tahun 2017 sebesar 60 triliyun, tahun 2018 sebesar 60 triliyun, tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 70 triliyun, tahun 2020 kembali mengalami kenaikan menjadi 72 triliyun dan di tahun 2021 anggaran dana desa sebesar 72 triliyun⁵. Dengan adanya anggaran dana desa yang besar diharapkan mampu membangun penyelenggaraan pemerintah, melaksanakan pembinaan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pengelolaan dana desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 tentang pengelolaan dana desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban⁶. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintah desa

⁴ Isnaeni Nurkhasanah, *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan Dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Pringsurat)*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah, Magelang, 53.9, 2019, 1689–99.

⁵ 'Ini Hasil Dana Desa Sejak 2015', *Kemenkeu.Go.Id*, 2019 , <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-hasil-dana-desa-sejak-2015/>, diakses 20 January 2022.

⁶ Nurkhasanah, 'Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Dan Pemanfaatan Tekhnologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus

harus transparansi, akuntabilitas dan partisipasi baik dibidang keuangan, kinerja maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan pengelolaan desa tergantung pada partisipasi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan desa seperti kepala desa, perangkat desa dan masyarakat yang ada dalam suatu desa.

Perangkat desa merupakan pihak yang terkait langsung atas pengelolaan dana desa yang diberikan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah yang kemudian disalurkan kepada desa-desa dengan prinsip pengelolaan dana desa yang bersih, transparan dan akuntabel. Untuk dapat mengelola dana desa secara baik maka diperlukan perangkat desa yang berkompeten. Kompetensi mencakup bidang pengetahuan, keterampilan dan keahlian seseorang dalam suatu bidang. Perangkat desa yang kompeten dan memiliki kompetensi dapat mengurangi tingkat kecurangan dalam pengelolaan dana desa⁷. Selain perangkat desa, terdapat komponen masyarakat dalam suatu desa dimana masyarakat bertugas untuk memberikan dukungan dan partisipasi atas keberhasilan program-program yang telah di rencanakan oleh desa⁸. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama yang baik antara perangkat desa dan masyarakat agar dapat menciptakan pengelolaan dana desa yang bersih, transparan dan akuntabel.

Akuntabilitas sendiri merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan dari setiap kebijakan yang dipercayakan kepada entitas untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya⁹. Akuntabilitas juga dapat dijadikan sebagai alat ukur apakah

Di Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang)', *Skripsi, UIN Walisongo Semarang*, 53.9 , 2019, 1689–99.

⁷ Enggar Wahyuning Pahlawan, Anita Wijayanti, and Suhendro Suhendro, *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, *Indonesia Accounting Journal*, 2.2 (2020), 162.

⁸ Ade Ayu Anggreni Putri, I Wayan Sudiana, and I Putu Deddy Samtika Putra Putra, 'Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli.', *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, April, 2021, 699–730.

⁹ Dwi Fitri Puspa and Riky Agung Prasetyo, 'Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa', *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20.2 (2020), 281 <<https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7894>>.

perangkat desa sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, bertanggung jawab dan etis atau justru sebaliknya. Dalam pengelolaan dana desa sistem pengendalian internal keuangan desa sangat dibutuhkan dalam mengatur dana desa yang telah dipercayakan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah desa mengingat jumlah dana desa yang dikucurkan memiliki jumlah yang sangat fantastis. Sistem Pengendalian Internal diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan konsisten untuk meyakinkan akan tercapainya tujuan melalui kehandalan pelaporan keuangan, keamanan aset yang dimiliki Negara dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan¹⁰.

Kabupaten Brebes merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang terdiri dari 17 Kecamatan dengan 292 Desa¹¹. Kabupaten Brebes digolongkan sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan urutan ketiga di provinsi Jawa Tengah. Presentase kemiskinan di Kabupaten Brebes pada tahun 2019 sebesar 16,22% dan ditahun 2020 meningkat menjadi 17,03%¹². Hal ini disebabkan karena beberapa faktor seperti upah minimum, pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan dan pengangguran di Kabupaten Brebes. Menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi membuat Kabupaten Brebes mendapatkan anggaran dana desa yang besar dari Pemerintah Pusat. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan dan penelitian Yulitasari dan Wido Prananing Tyas pada tahun 2020 menyebutkan bahwa Kabupaten Brebes merupakan salah satu Kabupaten dengan penerima anggaran dana desa tertinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar 495.643.148.000 (*empat ratus sembilan puluh lima miliar enam ratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah*)¹³. Pengelolaan dana

¹⁰ Zulkifl, Sandrayati Sandrayati, and Neni Ariani, *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, JEMBATAN (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Auditing, Dan Akuntansi)*, Vol. 6, No.1, 2021, h. 26–38 .

¹¹ Fajar Eko Nugroho, 'Dana Desa Di Brebes Sudah Tersalurkan Rp 61 Miliar', *Kumparan.com*, 2018 <<https://kumparan.com/panturapost/di-brebes-dana-desa-rp-61-miliar-sudah-tersalurkan-ke-17-kecamatan-27431110790536733/full>> [accessed 20 January 2022].

¹² Badan Pusat Statistik, *Kemiskinan 2019-2021*, <https://jateng.bps.go.id/indicator/23/34/1/kemiskinan.html> diakses 18 Januari 2022.

¹³ Yulitasari, Wido Prananing Tyas, Dana Desa Dan Status Desa di Provinsi Jawa Tengah, *Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan*, Vol.4, No.2, 2020, h.74-83.

desa di Kabupaten Brebes belum dapat dikatakan optimal terbukti masih terdapat kasus penggelapan dana desa di Kabupaten Brebes dan di triwulan keempat tahun 2021 penyerapan dana desa masih diangka 73%¹⁴. Dari beberapa fenomena yang ada, pengelolaan dana desa di Kabupaten Brebes dapat dikatakan belum mencapai akuntabilitas.

Kecamatan Ketanggungan adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Brebes dengan jumlah 21 Desa. Berdasarkan hasil data dari Badan Pusat Statistik Brebes, Kecamatan Ketanggungan mempunyai jumlah penduduk sebanyak 144.524 jiwa¹⁵. Mayoritas penduduk di Kecamatan Ketanggungan bermata pencaharian sebagai buruh tani, pedagang, petani, berkebun dan produksi tempe dan tahu. Adapun desa yang terdapat di Kecamatan Ketanggungan meliputi desa Dukuturi, Kubangwungu, Baros, Tanggungsari, Buara, Bulakelor, Ciduet, Cikeusal Kidung, Cikeusal Lor, Karangmalang, Ciseureuh, Dukuhtengah, Dukuhtengah, Jemasih, Karangbandung, Ketanggungan, Kubangjati, Kubangsari, Kubakaton, Pamendaran, Sidangjaya¹⁶.

Kecamatan Ketanggungan merupakan salah satu Kecamatan Brebes yang desanya masuk dalam kategori desa miskin di Kabupaten Brebes. Berdasarkan berita yang dilansir dari *Tribunjateng.com* menyebutkan bahwa Kepala Bagian Penanggulangan kemiskinan Setda Brebes, Farikha menyebutkan bahwa 34 desa di Brebes masuk dalam kategori miskin di Kabupaten Brebes. Akan tetapi 10 diantaranya masuk kedalam kategori desa sangat miskin yang memerlukan penanganan khusus yaitu Buara Kecamatan Ketanggungan, Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba, Pamulihan, Wanatirta dan Winduaji Kecamatan Paguyangan, Kutamendala Kecamatan Tonjong, serta Pesantunan Kecamatan Wanasari, Slati dan Wlahar Kecamatan Larangan serta Negla Kecamatan Losari.

¹⁴ Yaser Arafat, *Genjor Penyerapan Dana Desa, Bupati Gelar Rakor*, <https://brebeskab.go.id/index.php/content/1/genjor-penyerapan-dana-desa-bupati-gelar-rakor> diakses tanggal 18 Januari 2022.

¹⁵ Badan Pusat Statistik, 'Jumlah Penduduk Menurut Desa Di Kecamatan Ketanggungan 2020', *Bps.go.id*, 2020 <<https://brebeskab.bps.go.id/statictable/2021/08/12/1922/jumlah-penduduk-menurut-desa-di-kecamatan-ketanggungan-2020.html>> [accessed 19 January 2022].

¹⁶ Wikipedia, 'Ketanggungan, Brebes', *Wikipedia.org*, 2021 <https://id.wikipedia.org/wiki/Ketanggungan,_Brebes> [accessed 19 January 2022].

Adapun indikator yang dapat menjelaskan kategori desa miskin meliputi penduduk memiliki penghasilan dibawah 600.000 per bulan, alas rumah yang masih tanah, memiliki riwayat pendidikan tamatan SMP, tidak memiliki kilometer listrik sendiri, tidak memiliki WC, alat masak menggunakan kayu bakar, membeli pakaian baru setahun sekali dan mengkonsumsi makanan sehat hanya sekali dalam seminggu¹⁷. Dari pemaparan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes dapat dikategorikan sebagai kecamatan tertinggal karena dengan jumlah anggaran dana desa yang besar belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang ada di Kecamatan Ketanggungan. Oleh karena itu, akuntabilitas anggaran dana desa di Kecamatan Ketanggungan masih dibilang belum tercapai.

Pentingnya akuntabilitas dalam kehidupan sehari-hari telah di jelaskan oleh Allah SWT dalm QS : An-Nisa (4:58) :

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”
(QS.An-Nisa :58)

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pihak penerima amanah kepada pihak yang memberikan amanah¹⁸. Dalam lingkup Negara, Pemerintah diibaratkan sebagai agen yang memberikan amanah kepada desa untuk mengelola dana desa dengan akuntabel. Sedangkan pihak desa bertanggung jawab untuk memberikan pelaporan kepada Pemerintah atas penggunaan dana desa.

¹⁷ M. Zaenal Arifin, <https://jateng.tribunnews.com/2019/11/21/dari-34-desa-miskin-di-brebes-10-di-antaranya-kategori-sangat-miskin?page=2>, diakses 16 Maret 2022.

¹⁸ Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, Jakarta : (PT Hidakarya Agung, 2004), h.118-119.

Penelitian mengenai akuntabilitas dana desa telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya hanya saja menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Seperti penelitian Sarifudin Mada, dkk pada tahun 2017 yang menghasilkan kesimpulan penelitian bahwa variabel Kompetensi Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah bahwa pada penelitian terdahulu tidak terdapat variabel Sistem Pengendalian Internal. Penelitian Nafadhila Eka Indraswari, Yuliasuti Rahayu pada tahun 2021 yang menunjukkan hasil penelitian bahwa variabel Kompetensi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sedangkan variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terdapat penambahan variabel Sistem Pengendalian Internal.

Penelitian Enggar Wahyuning Pahlawan, dkk pada tahun 2021 menunjukkan bahwa variabel Kompetensi Aparatur Desa dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sedangkan variabel Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. terdapat persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah variabel Sistem Pengendalian Internal. Penelitian Suci Atiningsih, Aulia Cahya Ningtyas pada tahun 2019 menunjukkan bahwa variabel Kompetensi, Partisipasi dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana desa. Terdapat persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah menggunakan variabel yang sama yaitu Kompetensi, Partisipasi dan Sistem Pengendalian Internal. Terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian. Dalam penelitian ini membahas persoalan yang belum pernah dibahas pada penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga adanya penelitian ini dapat melengkapi penelitian yang sudah ada.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan penelitian terdahulu memperoleh kesimpulan yang berbeda-beda, maka peneliti mencoba meneliti dengan topik yang sama yaitu ***“Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes).”***

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan latar belakang yang telah peneliti paparkan, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab perumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca sekaligus peneliti tentang variabel apa saja yang memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

- b. Diharapkan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan perangkat desa.
2. Manfaat Praktis
- a. Bagi Pemerintah, diharapkan adanya penelitian ini dapat dijadikan sumber wawasan sekaligus tolak ukur yang mendeskripsikan sejauh mana usaha Pemerintah untuk mewujudkan Pemerintahan yang *Good Governance*.
 - b. Bagi Akademisi, diharapkan adanya penelitian ini dijadikan wawasan dan pemikiran dasar bagi peneliti selanjutnya dan dapat dijadikan sebagai literatur perpustakaan sehingga bermanfaat untuk pembaca.
 - c. Bagi Instansi, adanya penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu tentang akuntabilitas yang nantinya dapat meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola dana desa.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memudahkan pemahaman pembaca, skripsi ini terdapat lima bab didalamnya. Dimana setiap bab berisi persoalan saling terkait antara satu bab dengan bab lainnya. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I menjabarkan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada Bab II menjabarkan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka penelitian serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab III menjabarkan tentang jenis dan sumber data penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, penelitian dan pengukuran, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV menjabarkan deskripsi objek penelitian, penyajian data, serta analisis data dan pembahasan penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada Bab V menjabarkann kesimpulan dari penelitian, keterbatasan penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori

2.1.1. Teori Agensi (*Agency Teory*)

Teori *Agenci* adalah sebuah teori yang menggambarkan hubungan antara agen (penerima amanah) dengan principal (pihak pemberi amanah). *Agen* diartikan sebagai pihak yang menjalankan tugas atau wewenang dari *principal*. Sedangkan *principal* diartikan sebagai pihak pemberi wewenang kepada pihak agen untuk melaksanakan tugas tertentu¹⁹. Dalam pemerintahan desa, masyarakat diibaratkan sebagai principal atau pihak yang memberikan wewenang kepada agen untuk melaksanakan tugas tertentu. Sebagai *principal* masyarakat memiliki tugas untuk meminta pertanggungjawaban dari agen atas tugas dan wewenang yang telah diberikannya. Sedangkan kepala desa dan perangkatnya diibaratkan sebagai agen yang menjalankan wewenang atau tugas yang diberikan oleh masyarakat (*Principal*).

Sebagai *agent*, kepala desa beserta perangkatnya dituntut untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kepada *principal* tentang semua aktivitas yang dijalankan berkaitan dengan wewenang yang telah dipercayakan kepadanya. Disisi lain, pihak agen harus melaporkan pertanggungjawaban dengan jujur dan akuntabel kepada masyarakat desa (*principal*). Dalam PP. No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan terdapat hubungan antara teori agensi dengan akuntabilitas. Keterkaitan teori agensi dengan penelitian ini adalah dalam pengelolaan dana desa, perangkat desa berperan sebagai *agent* yang diberi amanah untuk membuat laporan pertanggungjawaban terkait pengelolaan dana desa bagi pihak yang berkepentingan. Sedangkan masyarakat

¹⁹ Andreani Avellyni Leda Making, Nur Handayani, *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa*, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 10, No.10, 2021.

bertindak sebagai *principal* atau orang yang memberi amanah dan berhak meminta laporan pertanggungjawaban kepada *agent* atau perangkat desa.

Dengan kerjasama yang baik antara *agent* dengan *principal* akan menghasilkan pengelolaan dana desa yang akuntabel untuk masyarakat. Adanya partisipasi dari masyarakat dalam pengelolaan dana desa akan meminimalkan resiko penyelewengan kepala desa beserta perangkatnya dengan demikian akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa akan terwujud. Berlandaskan teori agensi maka, pengelolaan keuangan daerah atau desa diperlukan adanya pengawasan dari masyarakat untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah atau desa sudah dilakukan dengan penuh tanggungjawab dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2. Pertanggungjawaban Perangkat Desa Dalam Mengelola Dana Desa

Secara konseptual, adanya wewenang menimbulkan kewajiban melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan kompetensi wewenang yang diberikan dan sekaligus menimbulkan tanggungjawab kepada pihak yang memberikan wewenang. Tanggung jawab diartikan sebagai sikap dan perilaku untuk melakukan suatu aktivitas tertentu serta mampu menanggung resiko atas segala perbuatannya. Dalam penggunaan wewenang tidak dapat terlepas dari pertanggungjawaban hal ini sejalan dengan hukum administratif bahwa tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Ia akan selalu beriringan karena setiap pelaksanaan wewenang akan timbul berbagai macam resiko atas kesalahan penggunaan wewenang.

Untuk mengetahui siapa yang berhak bertanggungjawab atas penggunaan wewenang yang melawan hukum, maka harus dilihat dari sumber perolehan wewenang tersebut. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang yang menduduki jabatan tertentu secara tidak langsung mereka sedang melaksanakan wewenang dan akan dimintai pertanggungjawaban atas pelaksanaan wewenang tersebut. Dalam

wewenang delegasi, tanggung jawab berada ditangan penerima delegasi dan apabila terjadi kesalahan dalam pelaksanaan wewenang maka pihak yang bertanggungjawab adalah pihak yang menerima wewenang delegasi. Sebaliknya, pada wewenang mandat terjadi pelimpahan wewenang dari atasan kebawahan tetapi bukan penyerahan wewenang. Oleh karena itu, ketika terjadi penyalahgunaan wewenang maka pihak yang harus bertanggungjawab adalah pihak pemberi mandat dan bukan pihak penerima mandat karena ini suatu bentuk pelimpahan bukan penyerahan²⁰.

Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban perangkat desa atas pengelolaan dana desa, pihak desa harus memberikan laporan atas pengelolaan dana desa kepada masyarakat melalui rapat Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam jangka waktu paling singkat satu kali dalam setahun²¹.

2.1.2.1. Pertanggungjawaban Dalam Perspektif Islam

Dalam islam, tanggungjawab diartikan sebagai suatu tindakan yang mana seseorang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Sikap tanggungjawab sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari baik terhadap pencipta maupun terhadap sesama. Tanpa tanggungjawab, kehidupan tidak akan pernah merasa damai karena semua yang kita perbuat akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat nanti²². Allah berfirman dalam QS. Ash-Shaffat ayat 22-24 :

أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ۝

مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَنَّةِ

وَقَفُّهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ۝

²⁰ Ajeng Kartika Anjani, *Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa*, Jurist Diction, Vol. 2, No.3, 2019, h.747-770.

²¹ Anak Agung Putu Wiwik, I Wayan Wiasta, Ketut Sukawati lanang, *Pertanggungjawaban Alokasi Dana desa Pelaga Terkait Program Pemberian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bandung*, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Fakultas Hukum, Skripsi, h.109-122.

²² Redaksi Dalam Islam, *19 Ayat Al-Qur'an Tentang Tanggungjawab*, Dalamislam.com, <https://dalamislam.com/landasan-agama/al-quran/ayat-al-quran-tentang-tanggung-jawab>, diakses 17 Januari 2022.

“(Diperintahkan kepada malaikat), “Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah selain Allah, lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Tahanlah mereka (di tempat perhentian), sesungguhnya mereka akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban. (QS. Ash-Saffat :22-24)

Kandungan dalam ayat tersebut memaparkan bahwa setiap tindakan manusia yang dilakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawabn di hari kiamat nanti. Orang-orang yang beramal shaleh maka ia akan dimasukan ke surga dan sebaliknya, orang yang menyekutukan Allah SWT akan dimasukan ke dalam neraka. Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban perangkat desa atas pengelolaan dana desa, ia bertugas untuk menjalankan wewenang yang telah di amanatkan kepadanya. Selain itu, perangkat desa harus melaksanakan wewenang tersebut dengan penuh tanggung jawab karena ia dituntut tidak hanya bertanggungjawab kepada pemberi wewenang atau masyarakat melainkan kepada Allah SWT di hari kiamat.

2.1.3. Kompetensi

Kompetensi secara bahasa dapat dimaknai sebagai keterampilan, kemampuan dan kecakapan. Kompetensi adalah keahlian yang dimiliki seseorang yang didapat dari proses pembelajaran, pelatihan dan pengalaman sehingga dapat melaksanakan tugas tertentu dengan baik. Menurut Rudana tahun 2005, kompetensi merupakan pengetahuan (*Knowledge*), keahlian (*Skills*), dan kemampuan (*Abilities*) yang dapat diterapkan dengan aturan tertentu. Spancer mendefinisikan kompetensi merupakan sifat khas yang dimiliki seseorang dengan tingkat efektivitas dalam bekerja prima²³.

Menurut Undang-untung Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2013 mendefinisikan kompetensi kerja sebagai kemampuan kinerja individu yang meliputi bidang keterampilan, pengetahuan dan *attitude* dalam bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan menurut Robbins

²³ Nurkhasanah, *Ibid*.

tahun 2007 mendefinisikan kompetensi sebagai kemampuan atau kapasitas yang seseorang untuk melakukan berbagai pekerjaan yang ditentukan oleh faktor kemampuan intelektual dan kemampuan fisik²⁴. Berdasarkan pengertian beberapa ahli maka dapat ditariki kesimpulan bahwa kompetensi adalah kemampuan, keterampilan, dan kecakapan seseorang dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya yang diperoleh dari proses pembelajaran, pelatihan dan pengalaman.

Berkaitan dengan pengelolaan dana desa, perangkat desa dituntut mempunyai kompetensi dalam mengelola dana desa dan memberikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dengan baik. Kompetensi yang dimaksud adalah bahwa setiap perangkat desa harus memiliki pengetahuan tentang regulasi pengelolaan dana desa, menguasai ilmu akuntansi, mampu mengoperasikan komputer dengan baik khususnya *ms.excel*, memiliki integritas yang tinggi dan inisiatif yang tinggi dalam bekerja. Dengan perangkat desa yang kompeten dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa²⁵.

2.1.3.1. Indikator Kompetensi

Menurut Dr. Emron Edison tahun 2016 untuk memenuhi unsur kompetensi, seorang pegawai harus memenuhi kriteria dibawah ini :

a. Pengetahuan

Seorang pegawai harus memiliki pengetahuan dibidang pekerjaan yang ditangani serta dapat meningkatkan kemampuan untuk memperoleh pengetahuan baru.

b. Keahlian

Seorang pegawai harus memiliki keahlian dibidang pekerjaan yang ditangani, dan memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi permasalahan yang timbul.

c. Sikap

²⁴ Arif Widyatama, dkk, *Pengaruh Kompoetensi dan Sistem Pengendalian Internal Tewrhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)*, Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, Vol.2, No. 2, 2017.

²⁵ Kabupaten Kuningan, <https://www.kuningankab.go.id/berita/kepala-desa-dan-sekdes-harus-mempunyai-kompetensi>, diakses 16 Maret 2022.

Seorang pegawai harus memiliki sikap inisiatif untuk membantu rekan kerja, memiliki sikap ramah dan sopan, serta dapat bekerja dengan serius untuk menangani setiap keluhan klien²⁶.

2.1.3.2. Kompetensi Individu

Menurut Michael Armstrong tahun 1998 Kompetensi individu merupakan pengetahuan, keterampilan dan kualitas hidup yang dimiliki seseorang untuk mencapai kesuksesan dalam pekerjaannya. Berikut lima karakteristik yang harus dimiliki oleh setiap individu antara lain :

- a. Motif, adalah suatu hasrat yang diinginkan dan diharapkan sehingga nantinya akan memunculkan suatu perbuatan.
- b. Sifat, adalah sifat khas dan jawaban terhadap suatu informasi.
- c. Konsep diri, adalah sikap, nilai dan karakteristik diri.
- d. Pengetahuan, merupakan informasi yang dimiliki seseorang mengenai suatu hal.
- e. Keterampilan, merupakan kemampuan untuk kinerja fisik dan mental²⁷.

Dalam kompetensi individu di kategorikan menjadi dua kompetensi yaitu kompetensi minimum (*Threshold*) yang merupakan kompetensi yang harus dimiliki individu seperti kemampuan menulis dan membaca. Dan kompetensi differentiating merupakan kemampuan seseorang untuk dapat mengklasifikasikan orang yang memiliki kinerja tinggi dengan yang kinerja rendah. Misalnya, seseorang dengan kemampuan kinerja tinggi akan dapat mencapai tujuan melebihi apa yang telah ditargetkan.

²⁶ Annisa Putri Soetrisno, Alini Gilanag, *Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Di PT Telekomunikasi Indonesia TBK Witel Bandung)*, Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen, Vol. VIII, No. 1, 2018.

²⁷ Catarina Cori Pradna Paramita, *Pengaruh Kompetensi Individu, Orientasi Kewirausahaan, dan Pesaing Dalam Mencapai Keunggulan Bersaing Melalui Kualitas Produk Studi Pada UKM Furniture Di Kota Semarang*, DeReMa Jurnal Manajemen, Vol.10, No.1, 2015.

2.1.3.3. Kompetensi Jabatan

Kompetensi jabatan merupakan kompetensi yang memiliki peran penting yang wajib diperhatikan oleh manajemen. Seseorang dapat dikatakan memiliki kinerja tinggi apabila kompetensi individu yang dimiliki cocok dengan pekerjaan yang diembannya. Berdasarkan standar kompetensi, kompetensi jabatan dibagi menjadi dua komponen yakni komponen utama yang wajib dimiliki seseorang sesuai dengan jabatan dan komponen pendukung yang mendukung atas terlaksananya suatu jabatan. Komponen utama dalam kompetensi jabatan adalah sebagai berikut :

- a. Akuntabilitas
- b. Organisasi pembelajaran
- c. Menentukan masalah dan memecahkan masalah tersebut
- d. Manajemen perubahan
- e. Perencanaan stratejik
- f. Manajemen kebijakan
- g. Manajemen kinerja
- h. Manajemen kualitas pelayanan
- i. Manajemen kerjasama

Komponen pendukung dalam kompetensi jabatan adalah sebagai berikut :

- a. Komunikasi
- b. Teknologi informasi²⁸.

2.1.3.4. Kompetensi Dalam Perspektif Islam

Dalam pandangan Islam prinsip kepemimpinan berpegang teguh pada asas tanggungjawab atas segala aktivitas yang dilakukan. Sikap dan tanggungjawab tersebut disesuaikan pekerjaan dan kompetensi masing-masing pemimpin. Konsep kepemimpinan dalam islam sangat memperhatikan keahlian dan kompetensi yang dimiliki pemimpin dalam menjalankan tugasnya sebagaimana Rosulullah SAW bersabda “*Apabila*

²⁸ Nurkhasanah, *Ibid.*

amanat disia-siakan, maka tunggulah saat kehancurannya". Bagaimana menyia-nyiaikan amanat itu ya Rasulullah? Tanya seorang sahabat; Rasulullah bersabda "Apabila perkara itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya." (HR. Bukhori)

Rosulullah memerintahkan umatnya untuk mempunyai etos kerja yang tinggi serta selalu meningkatkan keahlian dan kompetensi yang dimilikinya sesuai dengan bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah. Seperti yang terdapat dalam Hadits At-Thabrani 891, Baihaqqi :334

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُثِقَنَهُ (رواه الطبرني والبيهقي

Dari Aisyah r.a sesungguhnya Rosulullah bersabda "sesungguhnya Allah SWT mencontai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional." (At- Thabrani 891, Baihaqqi :334)

Berdasarkan riwayat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat harus memiliki etos kerja yang tinggi sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh manusia agar mampu bersaing dengan dunia global²⁹.

2.1.4. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi merupakan salah satu faktor penting bagi intansi pemerintah daerah/ desa untuk mencapai keberhasilan dalam mengelola dana desa. Secara bahasa, partisipasi dapat diartikan sebagai peran serta. Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 memaparkan bahwa partisipasi adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam pemerintahan daerah. Partisipasi ini dapat diimplementasikan dalam bentuk penyeluran hak-hak seperti hak hak memperoleh informasi, hak menyampaikan pendapat, dan hak untuk

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam perekonomian Islam*, Robbani Press, Jakarta, 2004, h. 151.

mendapatkan perlakuan yang sama³⁰. Sujarweni mendefinisikan partisipasi sebagai prinsip dimana setiap warga desa mempunyai hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah desa setempat.

Menurut Tilar tahun 2009 partisipasi merupakan bentuk keinginan masyarakat untuk mengembangkan budaya demokrasi melalui proses pelimpahan wewenang dimana upaya yang dilakukan seperti, perencanaan dari bawah dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan desa. Dari pengertian beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan suatu kegiatan dimana masyarakat secara langsung ikut andil dalam proses pencarian suatu permasalahan, penemuan potensi yang terpendam dalam masyarakat dan penemuan jalan keluar atas permasalahan yang telah teridentifikasi, serta melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses evaluasi dan perubahan yang terjadi³¹.

Pada dasarnya tujuan utama dari partisipasi masyarakat adalah melibatkan masyarakat langsung dalam pengelolaan dana desa, memberikan hak suara kepada masyarakat untuk menyatakan aspirasinya serta mengawasi pelaksanaan pengelolaan dana desa. Menurut Cohen dalam penelitian Naimah tahun 2017 partisipasi dibedakan menjadi beberapa macam diantaranya sebagai berikut :

- a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan (Masyarakat memberikan ide/gagasan alternatif untuk pembangunan desa)
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan (Masyarakat berkontribusi dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa)

³⁰ Wakhidatul Rizkiyah, *Peran Perangkat Desa, dan Partisipasi masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, (Universitas Muhammadiyah Magelang : Fakultas Ekonomi dan Bisnis), 2018.

³¹ Kartika Restu Aprilya, Astri Fitria, *Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol.9, No. 3, 2020.

- c. Partisipasi dalam pengambilan manfaat (Hasil dari pelaksanaan program yang telah dijalankan baik dari segi kualitas maupun kuantitas)
- d. Partisipasi dalam evaluasi (Memastikan pelaksanaan program apakah sesuai dengantujuan yang telah direncanakan)³².

2.1.4.1. Partisipasi Dalam perspektif Islam

Dalam ajaran Islam memerintahkan umatnya untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang menyangkut kepentingan bersama harus diputuskan secara musyawarah. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS Asy-Syura :38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝

“ Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka”. (QS. Asy-Syura :38)

Kandungan dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa partisipasi umat dapat diperoleh dengan cara musyawarah atau syura³³. Pada dasarnya Islam memiliki landasan dasar tata kehidupan bernegara yang disebut partisipasi public. Prinsip ini menjelaskan bahwa makna syura bukan hanya partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan melalui musyawarah. Dalam konteks Pemerintahan partisipasi memiliki makna hak yang dimiliki masyarakat untuk memilih kepala negara, ikut serta dalam menentukan kebijakan umum berupa APBN dan APBD, partisipasi dalam menentukan ketetapan yang dapat membawa kemaslahatan bagi

³² Siti Umaira, Adnan, *Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi (JIMEKA), Vol.4, No.3, 2019, h.471-481.

³³ Quraish Shihab, dkk, *Enslklopedia Al'Quran :Kajian Kosakata, Cet I*, Jakarta, Lentera Hati, 2007.

banyak orang serta partisipasi dalam mengawasi pemerintahan dalam penyelenggaraan negara.

Pada zaman Nabi Muhammad SAW dan sahabat, partisipasi dapat diterapkan dalam bentuk antara lain :

- a. Musyawarah melibatkan langsung antara pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan.
- b. Musyawarah melibatkan perwakilan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan karena kondisi tidak memungkinkan mengumpulkan seluruh masyarakat.
- c. Musyawarah dengan beberapa ahli untuk memecahkan persoalan khusus.

Partisipasi pada masa Nabi tidak dapat dipersamakan dengan bentuk pemerintahan pada masa sekarang. Namun, pada dasarnya hal tersebut sama-sama diperuntukan untuk kepentingan bersama.

2.1.5. Sistem Pengendalian Internal

Menurut Undang-undang No.60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Internal diartikan sebagai suatu proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh karyawannya untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan melalui suatu kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan³⁴. Mulyadi mendefinisikan sistem pengendalian internal sebagai struktur organisasi, cara-cara dan alat-alat dalam suatu perusahaan atau instansi untuk menjaga keamanan aset perusahaan³⁵. Dengan adanya sistem pengendalian internal diharapkan menjadi budaya pengawasan terhadap Pemerintah atas

³⁴ Arif Widyatama, dkk, *Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)*, Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol.2, No.2, 2017, h. 1-20.

³⁵ Mualifa, dkk, *Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)*, Journal Of Economic, Business and Engineering, Vol.1, No.1, 2019.

pengelolaan keuangan negara sehingga dapat mengatasi segala bentuk kecurangan yang dapat merugikan negara. Pada dasarnya tujuan utama adanya sistem pengendalian internal yaitu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Menurut Undang-undang No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian internal untuk mengatur pemerintahannya. Adanya sistem pengendalian internal menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya kepala desa melainkan secara individu. Selain itu, hadirnya sistem pengendalian internal tidak hanya untuk kepentingan administratif belaka melainkan sebagai bentuk perubahan sikap dan perilaku kepala desa. Oleh karena itu keberhasilan sistem pengendalian internal tidak dapat terlepas dari komitmen kepala desa beserta perangkatnya sebagai tauladan dalam mengelola dana desa³⁶.

Sistem pengendalian internal mempunyai unsur-unsur antara lain:

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah pencerminan integrasi untuk menciptakan kualitas kepemimpinan, Sumber Daya Manusia, serta metode kerja yang dapat membentuk suasana organisasi. Dalam Undang-undang No. 60 Tahun 2008 menjelaskan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menciptakan lingkungan pengendalian yaitu antara lain :

- a. Penegakan integritas dan nilai etika.
- b. Komitmen terhadap kompetensi.
- c. Kepemimpinan yang kondusif.
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.

³⁶ Mufti Arief Arfiansyah, *Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan dana Desa*, Journal Of Islamic Finance And Accounting, Vol.3, No.1, 2020, h.67-82.

- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
 - g. Perwujudan peran aparat pengawasan internal pemerintah yang efektif.
 - h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
2. Penilaian resiko

Penilaian resiko dimulai dengan menetapkan tujuan yang jelas dan konsisten. Selanjutnya Pemerintah mengidentifikasi dengan efisien dan efektif resiko yang dapat menghambat dalam proses pencapaian tujuan. Setelah resiko teridentifikasi, maka langkah selanjutnya menganalisis resiko untuk mengetahui pengaruh resiko terhadap pencapaian tujuan. Langkah terakhir merumuskan pendekatan manajemen untuk pengendalian resiko untuk memperkecil resiko yang akan terjadi.

3. Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian dimaksudkan untuk memastikan apakah perintah atasan sudah dijalankan dengan baik atau sebaliknya. Menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 pasal 16 ayat 2 menjelaskan terdapat beberapa karakteristik kegiatan pengendalian antara lain :

- a. Kegiatan pengendalian difokuskan pada kegiatan pokok instansi Pemerintah.
- b. Kegiatan pengendalian harus berkaitan dengan penilaian resiko.
- c. Kegiatan pengendalian hendaknya disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah.
- d. Kebijakan dan prosedur ditetapkan secara tertulis.

e. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara konsisten untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan apa yang telah direncanakan³⁷.

4. Informasi dan komunikasi

Instansi pemerintah harus memiliki informasi yang sesuai tentang keuangan dan nokeuangan baik bersumber dari internal maupun eksternal. Informasi dan komunikasi haruslah dilaksanakan secara efektif dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi yang sudah ada dengan konsisten.

5. Pemantauan pengendalian internal.³⁸

Pemantauan pengendalian internal harus dilakukan secara konsisten, evaluasi secara terpisah dan tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil audit dan review lainnya. Pemantauan berkelanjutan dilakukan melalui kegiatan rutin, perbandingan, supervisi, dan rekonsiliasi. Evelauasi terpisah dilakukan melalui penilaian sendiri, review, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian internal. Rekomendasi temuan hasil audit dan review lainnya harus dilakukan sesuai dengan rekomendasi hasil audit dan review lainnya yang telah ditetapkan.

2.1.5.1. Sistem Pengendalian Internal Dalam Perspektif Islam

Dalam pandangan islam, sistem pengendalian internal menganalogikan proses pengendalian pada manajemen. Berdasarkan filosofi dan historis ajaran islam dalam berbagai sumber ilmu pengetahuan, sistem pengendalian digambarkan sebagai berikut :

- a. Segala ketentuan dan peraturan baik perintah ataupun larangan dibuat dan di tetapkan oleh Allah SWT untuk seluruh umat manusia.

³⁷ M. Khoiru Rusydi, IAI Jawa Timur, *Sistem Pengendalian Internal Keuangan Desa*, <https://www.iaijawatimur.or.id> diakses 14 Januari 2022.

³⁸ Rita Martini, dkk, *Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa*, Jurnal Akademi Akuntansi Vol.2, No.1, 2019. h.106-123.

- b. Rosulullah SAW menyampaikan pesan tersebut kepada seluruh umat manusia melalui Al-Qur'an dan disyiarkan dengan dakwah melalui berbagai metode.
- c. Banyak orang yang menerima ajaran Rosulullah SAW yang telah di tetapkan oleh Allah SWT.
- d. Sebagian orang menolak dan mengabaikan ajaran Rosulullah SAW yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dengan tetap mempersekutukan Allah SWT.
- e. Sebagai tindakan selanjutnya, Allah memberikan kesempatan kepada mereka yang telah mempersekutukan-Nya dan tidak taat terhadap aturan yang telah ditetapkan-Nya melalui pertaubatan.

Dalam sistem pengendalian internal pada masa khalifah Umar bin Khattab, beliau menetapkan ruang lingkup dan tugas dari komandan dan gubernur. Umar mengarahkan setiap pemerintahan harus bekerja secara disiplin sesuai aturan. Beliau juga sering mengingatkan para pegawainya untuk tetap mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan individu, meskipun setiap orang memiliki hak kebebasan individu. Selain itu, beliau juga sering melakukan evaluasi terhadap pemerintahan yang kemudian apabila terdapat permasalahan atau tugas yang sulit, beliau meningkatkan SDM agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa pengendalian internal dimulai dari kontrol terhadap diri sendiri. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadillah ayat 7 :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Tidaklah kamu memperhatikan, bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah yang keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara)

lima orang, melainkan Dia-lah yang keenam. Dan tiada (pula) pembicaraan antara (jumlah) yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada bersama mereka, dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat, apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS : Al-Mujadilah :7)

Dalam kandungan surat Al-Mujadilah ayat 7 menjelaskan bahwa pengendalian yang paling efektif dilakukan adalah pengendalian terhadap diri sendiri. Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk tidak melakukan ghibah (membicarakan keburukan orang lain dibelakang) karena Dia-lah Allah SWT yang maha mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi maksudnya, Allah SWT senantiasa mengawasi mereka, mendengar ucapan, rahasia dan perbincangan mereka³⁹. Dan Allah SWT memerintahkan malaikat yang bertugas untuk mencatat setiap perbuatan manusia. Oleh karena itu, kontrol terhadap diri sendiri sangat perlu dilakukan karena pada dasarnya baik atau buruknya perbuatan yang dilakukan dapat dikontrol oleh diri masing-masing. Dan apapun yang kita lakukan dan dimanapun kita melakukan perbuatan nantinya akan dipertanggungjawaban kepada Allah SWT di hari kiamat nanti⁴⁰.

Dalam sistem pengendalian internal tidak dapat terlepas dari dua pendekatan; *pertama*, pendekatan konvensional yang lebih dikenal dengan sistem pengendalian COSO (*Commitee Of Sponsoring Organization Of The Treadway Commision*) yang telah dikeluarkan oleh lembaga *The Canadian Institute Of Chartered Accountants Criteria Of Control Cimmittee*. COSO adalah suatu sistem pengendalian yang dibuat setelah maraknya kasus penyelewengan di berbagai Negara. Terdapat lima komponen didalamnya yaitu antara lain :

³⁹ Abdul Ghoffar, Abdurrahim Mu'thi, Abu Ihsan Al- Atsari, *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 8* (Pustaka Imam Asy- Syafi'i, 2004) : h.82

⁴⁰ Trilusi Podami, *Pengawasan Pendidikan Mengacu Kepada Al-Qur'an dan Hadits*, Jurnal Al-Himayah, Vol. 3, No.2, 2019, h.295-320.

- a. Lingkungan pengendalian
- b. Penilaian resiko
- c. Aktivitas pengendalian
- d. Informasi dan komunikasi
- e. Pemantauan

Adapun model penyusunan sistem pengendaliannya adalah sebagai berikut

- a. *Purpose*
- b. *Commitment*
- c. *Capability*
- d. *Leraning*

Kedua, pendekatan syariah dimana bentuk pengendalian internal ini dimulai dari lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian mempunyai peran penting dalam membentuk karakter kepemimpinan yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Pada masa Rosulullah SAW, beliau dikenal sebagai sosok pemimpin yang memiliki integritas yang tinggi, amanah, berani, berkemampuan tinggi, cerdas dan berakhlak mulia sehingga pada masa kepemimpinannya Beliau mampu menciptakan aktivitas pengendalian yang baik, informasi dan komunikasi dapat berjalan dengan baik serta pengawasan yang dilaksanakan secara berkala⁴¹.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa aspek spiritual dan gaya kepemimpinan mempunyai peran penting untuk mewujudkan lingkungan pengendalian dan pembangunan pemerintahan sesuai ajaran Al-Qur'an dan Hadits.

2.1.6. Akuntabilitas

Menurut Mustofa pada tahun 2012 Akuntabilitas merupakan tidakan pokok untuk mempertanggungjawabkan suatu kesuksesan dalam mengelola kegiatan organisasi dan berharap sasaran yang di tuju sesuai

⁴¹ Arisman, dkk, *Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Dalam Perspektif Islam*, Akuntabilitas : Jurnal Ilmu dan Akuntansi, Vol.11, No.2, 2018, h.293-304.

dengan tujuan yang telah ditetapkan⁴². Menurut Mardiasmo tahun 2009 akuntabilitas merupakan bentuk keharusan penyampaian tanggungjawab baik terkait pencapaian keberhasilan maupun kegagalan atas segala kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai target sesuai perencanaan.

Menurut Sande tahun 2013 Akuntabilitas diartikan sebagai bentuk sistem pertanggungjawaban dalam mengolah berbagai sumber daya dan kondisi organisasi dipercayakan untuk melaksanakan kegiatan secara rutin untuk mencapai tujuan. Secara umum, akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pihak yang di beri amanah kepada pihak yang memberi amanah dengan menyajikan laporan dengan menyampaikan kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya⁴³. Akuntabilitas dibagi menjadi dua macam antara lain:

a. Akuntabilitas vertikal

Merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi seperti pemerintah desa ke pemerintahan daerah dan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.

b. Akuntabilitas horisontal

Merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat luas.

Menurut Elwwod dalam penelitian Mardiasmo tahun 2009 dimensi akuntabilitas dibagi menjadi lima yaitu sebagai berikut :

a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam suatu organisasi. Sedangkan akuntabilitas kejujuran adalah penghindaran terhadap tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.

b. Akuntabilitas Manajerial

⁴² Heri Sutanto, Pancawati Hardiningsih, *Akuntabilitas Pengelolaan BLT-Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19*, InFestasi, Vol. 17, No.1, 2021, h.1-10.

⁴³ Sjamsiar Sj. Indradi, *Akuntabilitas Konsep Dan Implementasi*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020, h.1.

Pertanggungjawaban dalam melaksanakan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi.

c. Akuntabilitas Program

Dalam suatu organisasi hendaklah memiliki program yang bermutu dan mendukung dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

d. Akuntabilitas Kebijakan

Lembaga publik harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai dampak yang akan dihadapi di masa mendatang.

e. Akuntabilitas Financial

Pertanggungjawaban lembaga publik dalam menggunakan dana publik secara ekonomis, efektif, efisien, tidak boros dan kebocoran dana seperti korupsi⁴⁴.

2.1.6.1. Jenis-jenis Akuntabilitas

Menurut Raba tahun 2006 akuntabilitas dibagi menjadi empat jenis antara lain :

1. Akuntabilitas hukum dan peraturan

Akuntabilitas hukum dan peraturan berkaitan dengan jaminan kepatuhan penggunaan dana publik terhadap hukum dan peraturan lainnya serta diperlukan adanya audit dalam pengelolaan dana publik.

2. Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses berkaitan dengan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah daerah apakah sudah optimal dalam memberikan pelayanan yang cepat, responsif dengan biaya murah.

3. Akuntabilitas program

⁴⁴ Siti Rodliyah Novita, dkk, *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada SD N 1 Bebalang Bangli Tahun 2015*, e-Journal Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen, Vol.7, 2019, h.80-88.

Akuntabilitas program terkait perimbangan apakah tujuan yang telah direncanakan tercapai dengan baik, dan apakah pemerintah daerah dapat membuat program dengan biaya minimal dan membuahkan hasil yang maksimal.

4. Akuntabilitas kebijakan

Dalam akuntabilitas kebijakan sangat diperlukan tranpransi kebijakan dari pemerintah daerah untuk masyarakat luas sehingga masyarakat dapat menilai dan mengawasi kinerja pemerintah daerah serta ikut serta dalam proses pengambilan keputusan.

2.1.6.2. Indikator Akuntabilitas

Menurut Dadang Solihin dan dalam penelitian Wempy Bunga tahun 2017 indikator akuntabilitas meliputi:

1. Kesesuaian pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kelalaian atau kesalahan pelaksanaan kegiatan.
3. Terdapat output dan income yang terukur.

2.1.6.3. Perangkat Indikator Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo terdapat perangkat indikator akuntabilitas antara lain:

1. Terdapat Standar operating Prosedur
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah
3. Adanya laporan tahunan
4. Adanya laporan pertanggungjawaban periodik
5. Adanya sistem pemantauan kinerja penyelenggaraan negara
6. Adanya sistem pengawsan
7. Terdapat mekanisme *reward* (hadiah) jika berhasil dan *punishment* (hukuman) jika melakukan kelalaian⁴⁵.

2.1.6.4. Akuntabilitas Dalam Perspektif Islam

⁴⁵ Irma Ikromul Mufidah Putri, *Akuntabilitas Kinerja Pegawai Dalam Meningkatkan Pelayanan Kebutuhan Lanjut Usia (Lansia)*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarief Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Skripsi, 2021.

Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa pertanggungjawaban seseorang berdasarkan individu. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS Al-Mudatsir ayat 38 :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

“Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya.”
(QS. Al-Mudatsir : 38)

Kandungan dalam ayat tersebut adalah bahwa setiap umat manusia akan diminta pertanggungjawabannya secara individu baik muslim ataupun nonmuslim baik hamba yang taat maupun hamba yang ingkar. Akan tetapi, terkadang perbuatan yang dilakukan individu mempengaruhi orang lain oleh karena itu, tanggung jawab bukan hanya sekedar kepada apa yang telah diperbuatnya tetapi meluas sampai dengan akibat-akibat yang ditimbulkan dari perbuatan individu yang telah dilakukannya.

Tanggungjawab seseorang berkaitan dengan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya. jadi semakin tinggi kedudukan seseorang di mata masyarakat maka akan tinggi pula pertanggungjawaban yang harus diberikan. Pemimpin harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, keluarga, saudara, dan rakyatnya. Allah SWT berfirman dalam QS At-Tahrim : 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“ Wahai orang-orang yang beriman! peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya adalah malaikatmalaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah SWT terhadap apa yang ia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang ia perintahkan.”
(QS At-Tahrim :6)

Kandungan dalam ayat tersebut memiliki arti bahwa seorang mukmin yang cerdas akan menerima kepemimpinan dengan ekstra hati-hati dan senantiasa memperbaiki dirinya, keluarganya, dan semua yang menjadi tanggungannya. Apapun level seorang pemimpin, semua akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya dihadapan Allah SWT atas semua yang terjadi pada rakyat yang dipimpinnya. Baik dan buruknya perilaku rakyat tergantung pada pemimpinnya sebagaimana rakyat akan bertanggungjawab atas pemimpin yang telah dipilihnya.

2.1.7. Pengelolaan Dana Desa

Menurut UU No.60 Tahun 2014 Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diperuntukan bagi desa melalui transfer ke rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa ditransfer melalui rekening APBD Kabupaten/Kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa dengan pemindahan rekening Kas Umum Negara Ke Kas Umum Daerah dan selanjutnya ke kas Rekening Kas Desa.

Penyaluran dana desa dilaksanakan melalui tiga tahap, tahap pertama bulan April sebesar 40%, tahap kedua bulan Agustus 40% dan tahap ketiga bulan Oktober sebesar 20%. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 dana desa dikelola berdasarkan ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab serta mengutamakan kepentingan bersama.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 pengelolaan dana desa merupakan seluruh kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa keuangan desa merupakan hak dan kewajiban desa yang dapat diukur dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

a. Perencanaan pengelolaan dana desa

Perencanaan merupakan tahap awal dalam melakukan suatu kegiatan dalam bentuk memikirkan ide/ gagasan tertentu untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Perencanaan merupakan tahap penting dalam melakukan suatu kegiatan karena tanpa perencanaan maka tidak ada dasar utama dalam melakukan kegiatan untuk pencapaian suatu tujuan. Allah berfirman dalam QS Al-Hasyr :18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانظُرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman ! bertakwalah kepada Allah SWT dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah SWT . Sungguh, Allah SWT Maha teliti apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Hasyr : 18)

Kandungan dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap umat manusia harus melakukan intropeksi atas semua perbuatan yang telah dilakukannya⁴⁶. Dalam kaitannya dengan perencanaan, ayat ini mendeskripsikan bahwa setiap melakukan aktivitas apapun hal yang pertama dilakukan adalah memikirkannya terlebih dahulu. Karena setiap perbuatan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Untuk itu, intropeksi diri sangat penting dilakukan karena untuk menuju kehidupan yang lebih baik lagi.

b. Pelaksanaan pengelolaan dana desa

Pelaksanaan merupakan kegiatan merealisasikan apa yang telah di rencanakan. Dalam islam, pelaksanaan kegiatan

⁴⁶ Abdul Ghoffar, Abdurrahim Mu’thi, Abu Ihsan Al- Atsari, *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 8* (Pustaka Imam Asy- Syafi’i, 2004) : h.122.

berpacu pada kalimat “*Manjadda wa jadda*” barang siapa yang bersungguh-sungguh maka apa yang ia kehendaki akan terjadi. Kalimat tersebut mengandung arti yang begitu besar, yakni ketika seseorang mealakukan kegiatan pekerjaan apapun jika dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh maka hasil yang didapat akan maksimal. Allah berfirman dalam QS. Al-Kahfi ayat 2 :

وَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّمَّنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ
الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا

“ *Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah SWT dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan aman sholeh, bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik.*” (QS. Al-Kahfi :2)

Kandungan dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa ketika seseorang berbuat kebaikan maka akan kembali kepadanya sebuah kebaikan⁴⁷. Sebaliknya, ketika seseorang berbuat dzolim maka kedzoliman akan kembali kepadanya. Dalam kaitannya dengan pemerintahan, segala bentuk pembangunan baik infrastrukut maupun lainnya yang termasuk amal sholeh karena memberikan kemaslahatan orang banyak maka bagi pemerintah desa yang amanah akan mendapatkan balasan kebaikan pula.

c. Penatausahaan pengelolaan dana desa

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan atau mendokumentasikan suatu kejadian atau kegiatan yang konsisten sehingga dicapai tata kelola yang rapi. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 :

⁴⁷ Quraish Shihab, *Al-Lubab Makna, Tujuan, dan Pelajaran Dari Surah-Suah Al-Qur'an*, Tangerang, Lentera Hati, 2012, h. 279.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Wahai orang-orang yang beriman! apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai maka hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.” (QS. Al-Baqarah :282).

Dalam kandungan ayat tersebut menjelaskan bahwa betapa pentingnya kita melakukan pencatatan untuk setiap transaksi baik dilakukan secara tunai maupun nontunai⁴⁸. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman di masa depan. Dalam kaitannya dengan pemerintahan desa, setiap pengeluaran dan pemasukan yang berkaitan dengan administrasi desa maka harus dilakukan pencatatan. Karena hal ini dijadikan bukti dan pengingat serta alat pertanggungjawaban di kemudian hari.

d. Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa

Pertanggungjawaban merupakan proses akhir dari serangkaian kegiatan yang dilakukan. Allah berfirman dalam QS. Al-Zalzalah ayat 7-8 :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)

“Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat (balasan) nya , dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. (QS. Al-Zalzalah :7-8)

Dalam kandungan ayat tersebut mempunyai makna bahwa seseorang yang berbuat baik sekecil apapun ia akan mendapatkan balasan yang baik pula. Sebaliknya, ketika

⁴⁸ Ihda Arifin Faiz, *Perangka Dasar kerangka Akuntansi Berlandaskan Syariah*, Yogyakarta, Gajdah Mada University Press, 2020, h. 118-128.

seseorang melakukan kejahatan sekecil apapun maka ia akan mendapatkan balasan kejahatan serupa⁴⁹. Sekecil apapun kebaikan dan kejahatan maka akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT di hari kiamat. Dalam kaitannya dengan pemerintahan desa, kepala desa beserta perangkatnya memiliki tanggungjawab untuk mengelola dana desa dengan akuntabel dan transparan karena hal tersebut akan dipertanggungjawabkan di dunia berupa laporan realisasi anggaran kepada bupati dan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak⁵⁰.

2.1.7.1. Asas Pengelolaan dana desa

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan untuk mencapai efektifitas dalam pengelolaan dana desa diantaranya:

1. Asas kesatuan, yang menghendaki setiap pendapatan dan belanja dilakukan pencatatan dalam kesatuan dokumen anggaran desa.
2. Asas Universalitas, yang menghendaki setiap transaksi ditampilkan secara utuh dalam anggaran desa.
3. Asas tahunan, asas yang membatasi masa berlakunya anggaran desa.
4. Asas spesialitas, asas yang mewajibkan setiap kredit anggaran di tampilkan secara rinci dan jelas.
5. Asas proporsionalitas, prinsip yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa.
6. Asas profesionalitas, asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan peraturan perundang-undangan.

⁴⁹ Syaikh Ahmad bin Musthafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i, Jilid 2*, (Almahira : 2007), h. 502.

⁵⁰ Onsardi,dkk, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Desa di Taba Padang Reja Kecamatan Huku Palik Kabupaten Bengkulu Utara*, Bilancia : Jurnal Ilmu Akuntansi, Vol. 4, No.3. 2020, h.248-261.

7. Asas keterbukaan, asas yang menghendaki keterbukaan informasi yang benar dan jujur dan tidak diskriminatif dalam pengelolaan keuangan desa.
8. Asas pemeriksaan keuangan oleh BPK yang bebas dan mandiri, artinya asas yang memberikan kebebasan kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan desa.
9. Asas *Value For Money*, asas yang menekankan dalam pengelolaan keuangan desa harus ekonomis, efisien dan efektif.
10. Asas kejujuran, asas yang menekankan dalam pengelolaan keuangan desa harus diberikan kepada perangkat yang memiliki integritas dan kejujuran tinggi.
11. Asas pengendalian, asas yang menghendaki dilakukan pengawasan terhadap pengeluaran dan pemasukan keuangan desa.
12. Asas ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, asas yang menekankan dalam pengelolaan keuangan desa harus taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Asas pertanggungjawaban, asas yang menghendaki untuk penerima amanah untuk bertanggungjawab kepada pemberi amanah atas kepercayaan yang diberikan kepadanya dalam pengelolaan keuangan desa.
14. Asas kepatuhan, asas yang menekankan adanya tindakan yang proporsional.
15. Asas manfaat untuk masyarakat, prinsip yang mengharuskan dalam pengelolaan keuangan desa harus digunakan untuk kepentingan masyarakat.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Hail Penelitian
Sarifudin Mada, Dkk (2017)	Pengaruh Kompetensi Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel kompetensi aparatur pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo. Ada perbedaan pada penelitian ini adalah pada variabel independen pengawasan.
Nafadhila Eka Indraswari dan Yuliasuti Rahayu (2021)	Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel kompetensi pemerintah desa dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas

		<p>pengelolaan dana desa di Kecamatan Manganti Kabupaten Gresik. Sedangkan variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Manganti Kabupaten Gresik. Perbedaan pada penelitian ini adalah pada variabel independen pemanfaatan teknologi informasi dan studi kasusnya.</p>
<p>Dwi Sapartiningsih, Dkk (2018)</p>	<p>Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p>	<p>Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi penganggaran dan pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Ada perbedaan</p>

		penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada variabel independen partisipasi masyarakat.
Isnaeni Nurkhasana (2019)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan Dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Se-Kecamatan Pringsurat)	Hasil penelitian mengatakan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi penganggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa se-kecamatan Pringsurat. Dan variabel komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa se-kecamatan Pringsurat sementara variabel kompetensi sumber daya manusia dan pengawasan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa se-kecamatan Pringsurat. Perbedaan

		pada penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada variabel partisipasi masyarakat dan studi kasus empirisnya.
Wakhidatul Rizkiyah (2018)	Peran Perangkat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa di Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang)	Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel peran perangkat desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dan desa di Kecamatan Grabag kabupaten Magelang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada variabel kompetensi aparatur dengan variabel pengawasan serta studi empirisnya.
Enggar Wahyuning, dkk (2020)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Kompetensi dan partisipasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan variabel Pemanfaatan

	Desa	Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
Suci Atiningtyas, Aulia Cahyaningtyas (2019)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Kompetensi, Partisipasi dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

2.3. Hipotesis

2.3.1. Pengaruh kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kompetensi adalah kewenangan atau kecakapan seseorang dalam mengerjakan atau melaksanakan suatu tugas sesuai dengan jabatan masing-masing. Kompetensi berhubungan dengan sikap, pengetahuan dan keahlian seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan. Kompetensi adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas. Dalam *Agency Teory* perangkat desa berperan sebagai agen yang menjalankan wewenang dari masyarakat untuk mengelola dana desa secara akuntabel. Untuk dapat

meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa maka diperlukan kompetensi dari setiap perangkat desa. Jika perangkat desa paham dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa maka tidak akan terjadi kecurangan yang dilakukan oleh perangkat desa. Jadi semakin tinggi kompetensi yang dimiliki perangkat desa maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Sarifudin Mada, dkk pada tahun 2017 membuktikan bahwa variabel kompetensi aparatur memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian Enggar Wahyuning Pahlawan, dkk tahun 2020 variabel kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli, dkk tahun 2021 menghasilkan kesimpulan yang sama bahwa variabel aparatur pengelola dana desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian Dwi Fitri Puspa dan Riky Agung Prasetya tahun 2020 menunjukkan bahwa variabel kompetensi pemerintah desa memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H1: Kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2.3.2. Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Partisipasi mempunyai peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Menurut penelitian Sujarweni tahun 2015 mengatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan prinsip yang mana setiap warga desa mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa setempat. Dalam PP. No. 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk antara lain : penyusunan peraturan kebijakan daerah, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian pembangunan daerah,

pengelolaan aset dan sumber daya alam daerah, penyelenggaraan pelayanan publik, dan akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintah daerah⁵¹. Pada dasarnya tujuan utama dari partisipasi adalah untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan *Agency Teory* masyarakat berperan sebagai *principal* yang memberikan wewenang atau amanah kepada agen (perangkat desa) untuk mengelola dana desa. Jadi, semakin tinggi partisipasi masyarakat terhadap Pemerintahan desa maka akan semakin meningkatkan akuntabilitas. Terlibatnya masyarakat dalam pengelolaan dana desa membuat masyarakat mempunyai tugas untuk memonitoring pengelolaan dana desa tersebut dengan begitu akuntabilitas akan tercapai.

Penelitian Sarifudin Mada, dkk tahun 2017 dan Wakhidatul Rizkiyah tahun 2018 menghasilkan kesimpulan bahwa variabel partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pada penelitian Siti Umaira dan Adnan tahun 2019 menghasilkan kesimpulan bahwa variabel partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat adalah salah satu cara meningkatkan akuntabilitas sebagai tanggapan dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Banyak sebagian masyarakat menyalahkan pemimpin atas pengambilan keputusan oleh karena itu, pasrtisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H2 : Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2.3.3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

⁵¹ Lembaran Negara Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, 2017, diakses 18 Januari 2022.

Pengendalian internal pada dasarnya ditujukan untuk pengamanan aset organisasi. Sistem pengendalian internal merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara konsisten oleh pemimpin dan seluruh pegawai untuk menjamin terlaksananya tujuan organisasi itu sendiri. Secara umum sistem pengendalian internal memiliki tujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas terlaksananya kegiatan yang efisien dan efektif, menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan serta pengamanan aset perusahaan dan mematuhi aturan yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan *Agency Teory* sistem pengendalian internal berperan sebagai monitoring hubungan yang terjalin antara agen dan *principal*. Dimana agen atau perangkat desa diberi amanah oleh *principal* atau masyarakat untuk menjalankan suatu wewenang dalam pengelolaan dana desa. Untuk itu, dibutuhkan suatu sistem yang mana sistem tersebut dapat mengendalikan tindakan dari agen agar tidak terjadinya suatu tindakan penyimpangan dan penyelewengan dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian variabel sistem pengendalian internal telah dilakukan oleh Zulkifli, dkk tahun 2021 yang menyatakan bahwa variabel sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas penegelolaan dana desa. Pada penelitian Suci Ningtyas, dkk tahun 2019 menghasilkan kesimpulan bahwa variabel sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pernyataan Suci Ningtyas juga diperkuat oleh penelitian Arif Widyatama tahun 2017 bahwa variabel sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu, penelitian Mufti Arief Arfiansyah tahun 2020 menghasilkan kesimpulan bahwa variabel sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

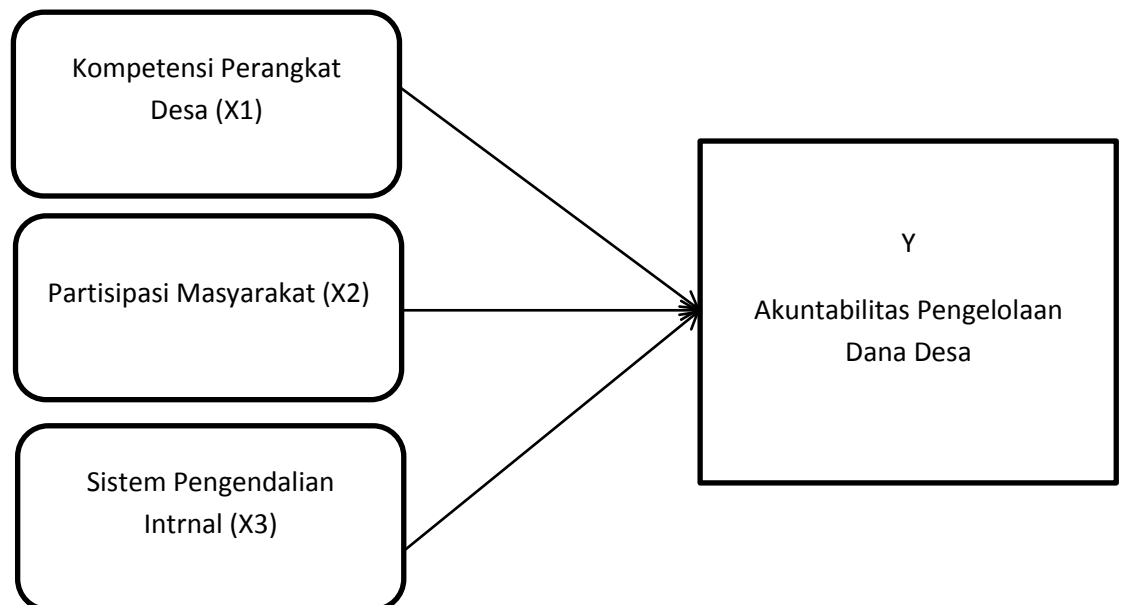
H3 : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2.4. Kerangka Pemikiran Teoritik

Untuk dapat mengetahui permasalahan yang akan diulas, maka diperlukan adanya kerangka pemikiran teoritik yang menjadi landasan dalam meneliti masalah dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran penelitian dan kerangka berfikir.

Berikut kerangka pemikiran teoritik dalam penelitian ini :

Gambar 2.2
Kerangka Teoritik



Berdasarkan gambar 2.2 menunjukkan bahwa variabel kompetensi perangkat desa, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pada variabel kompetensi perangkat desa mempunyai korelasi dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sesuai dengan *Agency Teory* bahwa perangkat desa berperan sebagai agen yang menjalankan wewenang yang diberikan oleh *principal* untuk mengelola dana desa. Jadi, semakin tinggi kompetensi yang dimiliki perangkat desa maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pada variabel partisipasi masyarakat mempunyai korelasi dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sejalan dengan *Agency Teory* masyarakat berperan sebagai *principal* yang memberikan wewenang kepada agen untuk pengelolaan dana desa. Meskipun masyarakat sebagai pemberi wewenang, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa seperti memberikan masukan rencana anggaran, ikut serta rapat dan berpartisipasi dalam pelaksanaan program desa. Jadi, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam Pemerintahan desa maka akan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Pada variabel sistem pengendalian internal mempunyai korelasi dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan *Agency Teory* sistem pengendalian internal berperan sebagai monitoring perangkat desa dalam mengelola dana desa sehingga dapat meminimalisir tindakan penyimpangan dan penyelewengan penggunaan dana desa. Jadi, semakin tinggi sistem pengendalian internal maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dimana data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Metode penelitian kuantitatif adalah salah satu metode yang memiliki spesifikasi yang sistematis, empiris, objektif, terukur dan rasional. Variabel dalam penelitian kuantitatif diukur dengan instrumen penelitian sehingga data yang terkumpul yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis dengan prosedur yang statistik⁵².

Metode kuantitatif digunakan untuk meneliti sampel dan populasi. Biasanya teknik pengambilan sampel dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian serta memiliki analisis data yang statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kausalitas. Pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antar variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) objek yang diteliti.

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek dan objek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti dengan tujuan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya⁵³. Populasi juga dapat diartikan sebagai subjek dalam penelitian yang hendak diteliti oleh peneliti. Biasanya populasi ini dijadikan acuan bagi penulis untuk menentukan sebuah sampel.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa yang bekerja di desa-desa yang ada di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes yang meliputi desa Dukuhbadag, Dukuhturi, Jemasih,

⁵² Adhu Kusumastuti, dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta, CV Budi Utama, 2012, h.2.

⁵³ Tuti Dharmawati, dkk, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Village Fund Management Accountability)*, Jurnal Studi Islam Lintas Negara, Vol. 3, No.1, 2021, h.34-42.

Karangbandung, Karangmalang, Ketanggungan, Kubangjati, Kubangsari, Kubangwungu, Kubakaton, Pamendaran, Sidangjaya dan Tanggungsari, Baros, Buara, Bulakelor, Ciduet, Cikeusal Kidul, Cikeusal Lor, Ciseureuh, Dukuhtengah, yang berjumlah 168.

3.2.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu⁵⁴. Secara teori, semakin besar sampel yang digunakan maka akan semakin mendekati pada keterwakilan dari populasi⁵⁵. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *non probability sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel dengan tidak memberikan peluang yang sama untuk setiap unsur populasi dipilih menjadi anggota dalam sampel.

Adapun sampel penelitian ini dihitung berdasarkan rumus *Slovin*. Rumus *Slovin* merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung minimal sampel yang digunakan dalam penelitian jika sampel tidak diketahui secara pasti⁵⁶. Nilai maksimum *error* dalam penelitian ini sebesar 10% dengan jumlah populasi sebanyak 168. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan =

n = Jumlah sampel

N = Jumlah total populasi

e = standar error

Dari rumus diatas diperoleh hasil sebagai berikut :

⁵⁴ Nurkhasanah, *Ibid*, h.58.

⁵⁵ Eddy Roflin, dkk, *Populasi, Sampel, Variabel Dalam Penelitian Kedokteran*, Pekalongan, PT Nasya Expanding Management, 2021, h. 13.

⁵⁶ Syafira Putri Kinanti, Berlian Permadani Satria Putri, *Pengaruh Media Sosial Zapcoid@ Terhadap Brand Equity Zap Clinic*, Jurnal Komunikasi, Vol.9, No.1, 2017, h. 53-64.

$$n = \frac{168}{1 + 168(0,1)^2} = 62,6$$

Hasil diatas dibulatkan menjadi 63.

Teknik sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, karena informasi seputar penelitian diambil dari sumber yang sengaja dipilih dengan kriteria tertentu dan pertimbangan tertentu.

Adapun kriteria sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah antara lain :

- a. Perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, sekertaris desa, dan kasi pelayanan dan kesejahteraan.
- b. Mempunyai masa kerja minimal 1 tahun.
- c. Latar belakang pendidikan minimal SMA/SMK sederajat dengan asumsi bahwa lulusan SMA/SMK sederajat dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungan kerjanya.

Berdasarkan perhitungan sampel dan kriteria sampel penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 63 perangkat desa atau sekitar 37,5% dari jumlah populasi yang terdiri dari kepala desa, sekertaris desa dan kasi pelayanan dan kesejahteraan desa yang bekerja di desa-desa yang ada di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.

3.3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1. Sumber Data

Sumber data merupakan acuan peneliti dalam mengolah data penelitian. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang didapat dari narasumber yang menjadi objek penelitian.

Data primer diperoleh melalui penyebaran kuisisioner kepada responden yang terkait langsung dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Ketanggungan. Sedangkan data sekunder adalah data yang

telah dikumpulkan oleh pihak lain⁵⁷. Dalam penelitian ini didapat dari buku, jurnal, artikel dan majalah serta data yang diperoleh dan telah diteliti oleh pihak lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

3.3.2. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik survei dengan menyebarkan kuisisioner kepada responden yang memenuhi kriteria di desa Kecamatan Ketanggungan. Kuisisioner adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan berbagai macam pertanyaan mengenai suatu topik yang akan diteliti kepada responden yang bersangkutan yang kemudian dijawab dengan skala likert/angka⁵⁸.

Kuisisioner dibuat dalam bentuk pernyataan struktur dimana responden diberi batasan untuk menjawab kuisisioner hanya dengan alternatif jawaban yang telah ditentukan. Dalam kuisisioner penelitian ini menggunakan alat ukur yang disebut *Skala Likert* yang merupakan alat untuk mengukur persepsi, pendapat serta sikap seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Kemudian jawaban setiap item *Skala Likert* mempunyai nilai dari sangat positif sampai dengan negative, seperti yang telah dijelaskan oleh Sugiyono adalah sebagai berikut :

Sangat Setuju	: 5
Setuju	: 4
Netral	: 3
Tidak Setuju	: 2
Sangat Tidak Setuju	: 1

3.4. Variabel dan Indikator Penelitian

3.4.1. Variabel

Variabel adalah sesuatu yang didalamnya terdapat atribut-atribut, unit-unit, dimensi-dimensi atau nilai-nilai yang beragam. Sugiyono tahun 2009 mendefinisikan variabel sebagai sesuatu yang berbentuk apa saja

⁵⁷ Puteri Ainurrohma Romantis, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Penarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014*, Universitas Jeember Fakultas Ekonomi, Skripsi, 2015.

⁵⁸ Heri Sutanto, *Ibid.*

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Menurut Arikunto tahun 2010 variabel penelitian merupakan objek penelitian atau apa yang menjadi perhatian suatu penelitian. Dari beberapa definisi menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian merupakan suatu besaran yang dapat diubah atau berubah sehingga dapat mempengaruhi peristiwa atau hasil penelitian⁵⁹.

Dalam penelitian ini menggunakan variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan variabel lain. Sedangkan variabel dependen merupakan variabel yang keberadaannya dipengaruhi atau menjadi akibat variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kompetensi aparatur (X_1), partisipasi masyarakat (X_2) dan sistem pengendalian internal (X_3). Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y).

3.4.2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan pernyataan yang menerangkan tentang definisi, cara ukur, alat ukur, hasil ukur, dan skala ukur dari variabel-variabel yang akan diteliti. Wahab mendefinisikan definisi operasional sebagai variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati, sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena⁶⁰. Dalam penelitian ini terdapat empat variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, sistem pengendalian internal dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

⁵⁹ Fifit Nur Walyati, *Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Desa Se - Kecamatan Muntilan)*, Universitas Muhammadiyah Magelang : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Skripsi, 2020.

⁶⁰ Tika risyawati, *Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem penegndalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Di Kecamatan Bandongan)*, Universitas Muhammadiyah Magelang , Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Skripsi, 2019.

Mardiasmo mendefinisikan akuntabilitas sebagai prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran yang dimulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat⁶¹. Variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diukur dengan menggunakan instrumen penelitian yang digunakan oleh Nurkhasanah tahun 2019. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diukur dengan menggunakan indikator kejujuran dan keterbukaan informasi, kepatuhan pelaporan, kesesuaian prosedur, kecukupan informasi dan ketepatan. Oleh karena itu, penulis menggunakan indikator tersebut untuk dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini.

Kompetensi merupakan kewenangan atau kecakapan seseorang dalam mengerjakan atau melaksanakan suatu tugas sesuai dengan jabatan masing-masing. Untuk Variabel Kompetensi perangkat desa indikatornya diperoleh dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sarifudin Mada dkk tahun 2017 dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dikarenakan dalam penelitian tersebut menggunakan indikator mencakup pengetahuan, pemahaman, keahlian teknis, kemampuan mencari solusi, inisiatif dalam bekerja serta keramahan dan kesopanan. Sehingga penulis menggunakan indikator tersebut dalam penelitian ini.

Partisipasi masyarakat adalah hak dan kewajiban warga negara untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok, sehingga mereka ikut diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan kreatifitasnya⁶². Untuk variabel partisipasi masyarakat dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian terdahulu Sarifudin Mada, dkk tahun 2017 dalam

⁶¹ I Widya Yahya, *Pengaruh Akuntabilitas, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Pegawai Di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo)*, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Skripsi, 2021

⁶² https://id.m.wikipedia.org/wiki/partisipasi_masyarakat Tanggal 16 Januari 2022.

penelitian ini menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo. Indikator partisipasi masyarakat mencakup pengambilan keputusan, penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran. Sehingga penulis menjadikan indikator tersebut sebagai acuan dalam penelitian ini.

Sistem Pengendalian Internal adalah salah satu cara untuk memberikan pengarahan, pengawasan dan pengukuran sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu perusahaan⁶³. Pengendalian internal adalah proses integral yang dilakukan secara konsisten oleh pemimpin dan seluruh pegawainya dengan tujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan, mengamankan aset perusahaan serta menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk variabel sistem pengendalian internal penulis menggunakan penelitian Andi Ahmad Yani tahun 2020 yang mana menghasilkan kesimpulan bahwa variabel sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Adapun indikator sistem pengendalian internal yang digunakan dalam penelitian ini meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan⁶⁴.

Tabel 3.1
Variabel Dan Indikator

Variabel	Definisi	Indikator	Sumber Indikator	Skala pengukur
Akuntabilitas pengelolaan	Kewajiban pemerintah desa	<ul style="list-style-type: none"> • Kejujuran dan 	Nurkhasanah (2019)	Skala likert (18 item Pernyataan

⁶³ Muhammad Nur Aziis, Sawitri Dwi Prastiti, *Faktor- faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa*, Jurnal Akuntansi Aktual, Vol. 6, No.2, 2019.

⁶⁴ Andi Ahmad Yani, *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, Konsep Value For Money, dan Sistem PengendalianInternal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Digital (Di Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Selatan)*, Universitas Muhamadiyah Makassar : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, skripsi, 2020.

dana desa (Y) Variabel dependen	untuk memberikan pertanggungjaw aban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatannya terkait dengan pengelolaan dana desa.	keterbukaan informasi <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan pelaporan • Kesesuaian prosedur • Kecukupan informasi • Ketepatan 		dengan 5 point)
Kompetensi Perangkat Desa (X ₁) Variabel independen	Kewenangan atau kecakapan seseorang dalam mengerjakan atau melaksanakan suatu tugas sesuai dengan jabatan masing- masing.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman • Kemampuan (<i>Skill</i>) • Sikap • Keahlian teknis • Inisiatif dalam bekerja • Keramahan dan kesopanan 	Sarifudin Mada (2017)	Skala likert (6 item pernyataan dengan 5 point)
Partisipasi Masyarakat (X ₂) Variabel independen	Peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya	<ul style="list-style-type: none"> • Pengambilan keputusan • Penyusunan Anggaran • Pelaksanaan anggaran 	Sarifudin Mada (2017)	Skala likert (6 pernyataan dengan 5 point)

	dalam Pemerintah daerah.			
Sistem Pengendalian Internal (X ₃) Variabel independen	proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh karyawannya untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisai yang telah ditetapkan melalui suatu kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan	<ul style="list-style-type: none"> • Lingkungan pengendalian • Penilaian resiko • Aktivitas pengendalian • Informasi dan komunikasi • pemantauan 	Andi Ahmad Yani (2020)	Skala likert (5 item pernyataan dengan 5 point)

	perundang-undangan.			
--	---------------------	--	--	--

3.5. Teknik Analisis Data

3.5.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan responden penelitian (nama responden, jenjang pendidikan, tingkat jabatan, lama masa kerja jenis kelamin, umur.). Penelitian juga menggunakan statistik deskriptif berupa mean, standar deviasi, nilai minimum dan nilai maksimum⁶⁵.

3.5.2. Uji Kualitas Data

3.5.2.1. Uji Validitas

Uji Validitas bertujuan untuk mengukur sah tidaknya kuisisioner. Kuisisioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuisisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur pada kuisisioner tersebut. Menguji validitas pada instrumen penelitian ini dengan menggunakan uji validitas dengan *Confirmatory Factor Analysis (CFA)*. Dimana *CFA* ini digunakan untuk menguji suatu variabel yang mempunyai undimensionalitas atau apakah indikator-indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasi sebuah variabel. Dalam artian, *CFA* dapat digunakan untuk menguji apakah indikator tersebut benar-benar merupakan indikator dari variabel tersebut.

Confirmatory Factor Analysis (CFA) akan mengelompokan masing-masing indikator kedalam beberapa indikator yang digunakan yang merupakan indikator konstruk kemudian akan mengelompok menjadi satu dengan faktor loading yang tinggi. Ketika dalam pengelompokan tersebut terjadi kesulitan maka dapat dilakukan rotasi. Alat penting untuk interpretasi faktor adalah *factor rotation*. Rotasi ortogonal melakukan rotasi dengan sudut 90 derajat, sedangkan rotasi yang tidak 90 derajat disebut *oblique rotation*. Menurut Gozali tahun

⁶⁵ Isnaeni Nurkhasanah, *Ibid*, h. 42.

2016 Rotasi ortogonal dapat berbentuk *quartimax*, *varimax*, *equimax* dan *promax*.

Asumsi yang mendasari dapat tidaknya digunakan analisis faktor yaitu data matrik harus memiliki korelasi yang cukup (*sufficient correlation*). Uji *Bartlett of Sphericity* adalah uji statistik untuk menentukan ada tidaknya korelasi antar variabel penelitian. Semakin besar sampel menyebabkan *Barlett test* maka akan semakin sensitif untuk mendeteksi adanya korelasi antara variabel. Alat uji lain yang digunakan untuk mengukur tingkat *interkorelasi* antar variabel adalah *Kaiser Meyer Olkin Measure of Samoling Adequacy* (KMO). Nilai KMO bervariasi dari 0 sampai dengan 1. Nilai yang dikehendaki harus $> 0,50$ dan *cross loading* $> 0,50$ untuk dapat melakukan analisis faktor menurut Ghazali tahun 2016⁶⁶.

3.5.2.2. Uji Realibilitas

Pengujian reliabilitas bertujuan untuk mengetahui konsistensi dari hasil pengukuran variabel penelitian⁶⁷. Realibilitas adalah ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab kuisisioner. Suatu kuisisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan tersebut konsisten dari waktu ke waktu⁶⁸.

3.5.3. Uji Asumsi Klasik

Uji aumsi klasik merupakan analisis yang digunakan untuk menilai apakah didalam sebuah model regresi *linear Ordinary Least Square* (OLS) terdapat masalah asumsi klasik⁶⁹.

⁶⁶ Febrinawati Yusup, *Uji Validitas dan Reabilitas Instrumen Penelitian Kuantitatif*, (Universitas Islam Negeri Antasari, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan), 2018.

⁶⁷ Nur Ida Yesinia, Dkk, *Ibid*, h. 107.

⁶⁸ Novindra Dwi Setiawan, Nur Laila Yuliani, *Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa se-Kecamatan Mungkid)*, Universitas Muhamadiyyah Magelang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2017.

⁶⁹ Ely Ayuning Astuti, *Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas dan Peran Perangkat desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, Universitas Muhammadiyah Magelang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2019.

3.5.3.1. Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi dengan normal atau tidak. Uji normalitas dilaksanakan dengan membandingkan data yang dimiliki dengan data distribusi normal yang memiliki mean dan standar deviasi yang sama dengan data kita⁷⁰.

3.5.3.2. Uji Heteroskedastitas

Uji Heteroskedastitas merupakan pengujian untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Deteksi Heteroskedastitas dapat dilakukan dengan metode scatter plot dengan memplotkan nilai ZPERD (Nilai Prediksi) dengan SRESID (Nilai Residualnya).

3.5.3.3. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk melihat ada tidaknya korelasi antar variabel bebas dalam suatu model linear berganda. Alat statistik yang sering digunakan dalam melakukan pengujian ini adalah *Variance Inflation Factor* (VIF), korelasi person antara variabel-variabel bebas, atau dengan melihat *eigenvalues* dan *Condition Index* (CI)⁷¹.

3.5.4. Pengujian Hipotesis

Hipotesis diartikan sebagai jawaban atau dugaan sementara tentang rumusan permasalahan yang bersifat praduga atau lemah sehingga harus dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian. Rumusan permasalahan ini dapat berupa hubungan antar variabel, perbandingan komparasi atau variabel mandiri (deskripsi).

3.5.4.1. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu kompetensi aparatur (X1), partisipasi masyarakat (X2), dan sistem pengendalian internal (X3) terhadap variabel

⁷⁰ Nurkhasanah, *ibid*, h.68.

⁷¹ Niken Wulandari, *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi dan Sistem pengendalian Internal Terhadap Upaya Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Empat Belas Desa Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Gunungkidul*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Skripsi, 2021.

dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y)⁷². Pengujian hipotesis pada analisis regresi liner berganda dapat diformulasikan seperti dibawah ini :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

a = Nilai Intersep (konstan)

b₁, b₂, b₃ = Koefisien Regresi

X₁ = Kompetensi Aparatur

X₂ = Partisipasi Masyarakat

X₃ = Pengawasan

3.5.4.2. Uji T

Menurut Ghazali Pada dasarnya uji statistik t bertujuan untuk menguji hipotesis sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen⁷³. Berikut ketentuan dalam menentukan hasil uji T digunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan (*df*) = n-1 adalah sebagai berikut :

- a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $P\ value < a = 0,05$ maka Ho ditolak dan Ha diterima berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $value < a = 0,05$ maka Ho diterima dan Ha ditolak berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen⁷⁴.

⁷² Dwi Sapartiningsih,Dkk, *Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 14 No. 1 Maret 2018 :100-114.

⁷³ Ni Komang Ayu Julia Praba Dewi, Gayatri, *Faktor-Faktor Ynag Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, E Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 26 No. 2 Febuari (2019) 1269-1298, h. 1289.

⁷⁴ Ely Ayuning Astuty, *Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem penegndalian Internal, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas dan peran Perangkat desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, Universitas Muhammadiyah Magelang , Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Skripsi, 2019.

3.5.4.3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji sejauh mana model penelitian dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien variasi antara nol sampai dengan satu. Jika nilai R^2 nol maka kemampuan variabel independen mempengaruhi variabel dependen terbatas. Sedangkan nilai R^2 mendekati satu berarti hampir memberikan segala informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi adanya variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh kompetensi perangkat desa, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. Berdasarkan teori yang telah dipaparkan peneliti mencoba menganalisis data yang telah terkumpul dengan formulasi hipotesis yang telah ditentukan apakah akan diterima atau ditolak. Penelitian ini ditujukan untuk perangkat desa yang bekerja di kantor balai desa yang ada di Kecamatan Ketanggungan.

Kecamatan Ketanggungan adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Brebes yang memiliki 21 Desa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Brebes, Kecamatan Ketanggungan memiliki jumlah penduduk sebanyak 144.524 jiwa. Mayoritas penduduk di Kecamatan Ketanggungan bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani, pedagang, berkebun dan pengrajin tempe/tahu. Adapun desa yang terdapat di Kecamatan Ketanggungan meliputi desa Baros, Buara, Bulakelor, Ciduet, Cikeusal Kidung, Cikeusal Lor, Cisureuh, Dukuhtengah, Dukuhsadag, Dukuhturi, Jemasih, Karangbandung, Karangmalang, Ketanggungan, Kubangjati, Kubangsari, Kubangwungu, Kubakaton, Pamendaran, Sidangjaya dan Tanggungsari.

Kecamatan Ketanggungan merupakan salah satu Kecamatan Brebes yang masuk dalam kategori desa miskin di Kabupaten Brebes. Berdasarkan berita yang dilansir dari *Tribunjateng.com* menyebutkan bahwa Kepala Bagian Penanggulangan kemiskinan Setda Brebes, Farikha menyebutkan bahwa 34 desa di Brebes masuk dalam kategori miskin di Kabupaten Brebes. Akan tetapi 10 diantaranya masuk kedalam kategori desa sangat miskin yang memerlukan penanganan khusus yaitu Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba, Buara Kecamatan Ketanggungan, Pamulihan, Slati dan Wlahar Kecamatan Larangan, Negla Kecamatan

Losari, Wanatirta dan Winduaji Kecamatan Paguyangan, Kutamendala Kecamatan Tonjong, serta Pesantunan Kecamatan Wanasari⁷⁵.

Adapun indikator yang dapat menjelaskan kategori desa miskin meliputi penduduk memiliki penghasilan dibawah 600.000 per bulan, alas rumah masih tanah, memiliki riwayat pendidikan mayoritas hanya lulusan SMP sehingga banyak warga disana yang menikah di usia dini, tidak memiliki kilometer listrik sendiri, tidak memiliki WC, alat masak menggunakan kayu bakar, membeli pakaian baru setahun sekali dan mengkonsumsi makanan sehat hanya sekali dalam seminggu⁷⁶. Selain itu, infrastruktur di desa Kecamatan Ketanggungan masih belum memadai terbukti saat penyebaran kuisisioner terdapat banyak jalan yang belum diaspal khususnya desa Buara dan Baros di Kecamatan Ketanggungan.

Data dalam penelitian ini bersumber dari kuisisioner yang telah dibagikan kepada responden atau perangkat desa secara langsung yang bekerja di Balai Desa yang ada di Kecamatan Ketanggungan. Peneliti telah menyebarkan kuisisioner sebanyak 70 responden dengan tingkat pengembalian yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Distribusi Kuisisioner

NO	Keterangan	Jumlah Kuisisioner	Presentase
1.	Kuisisioner yang disebar	70	70
2.	Kuisisioner yang kembali	63	63
3.	Kuisisioner yang tidak kembali	7	3
4.	Kuisisioner yang diolah	63	63

⁷⁵Kuntoro Tayubi, <https://www.medcom.id/nasional/daerah/dN62I9vN-34-des-a-di-brebes-masuk-kategori-miskin>, 21 November 2019, diakses 16 Febuari 2022.

⁷⁶M. Zaenal Arifin, <https://jateng.tribunnews.com/2019/11/21/dari-34-des-a-miskin-di-brebes-10-di-antaranya-kategori-sangat-miskin>, 21 November 2019, diakses 16 Febuari 2022.

Berdasarkan tabel 4.1 menjelaskan bahwa kuisioner disebar sebanyak 70 akan tetapi hanya 63 kuisioner yang dapat diolah dan 7 kuisioner tidak kembali.

4.2. Deskripsi Data

4.2.1. Deskripsi Responden

4.2.1.1. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Penelitian ditujukan untuk 63 responden dengan berdasar jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Kategori	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
A.	Laki-laki	48	76,2
B.	Perempuan	15	23,8
	Jumlah	63	100

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari total 63 responden ternyata jumlah perangkat desa laki-laki sebanyak 48 orang dengan presentase 76,2% dan perempuan sebanyak 15 orang dengan presentase 23,8%.

4.2.1.2. Karakteristik responden berdasarkan latar belakang pendidikan

Tabel 4.3

Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Kategori	Pendidikan	Jumlah	Presentase
A.	SD	0	0
B.	SMP	0	0
C.	SMA/SMK	54	85,7
D.	S1	9	14,3
	Jumlah	63	100

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari jumlah responden sebanyak 63 orang ternyata mayoritas memiliki latar belakang pendidikan terakhir SMA/SMK yaitu sebanyak 85,7% dan sebanyak 9 responden tamatan S1 atau 14,3%.

4.2.1.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatannya

Tabel 4.4

Responden Berdasarkan Jabatan

Kategori	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
A.	Kepala Desa	21	33,3
B.	Sekretaris Desa	21	33,3
C.	Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan	21	33,4
D.	Jumlah	63	100

4.3. Teknik Analisis Data

4.3.1. Deskripsi statistik

Analisis deskriptif bertujuan untuk menjelaskan sampel pertanyaan yang telah disebar. Analisis deskriptif meliputi mean, median, maximum, minimum, dan standar deviasi jawaban dari responden untuk tiap variabel. Statistik deskriptif menggambarkan persepsi perangkat desa terhadap pernyataan yang telah diajukan atas tiap-tiap variabel. Hasil analisis deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.5

Hasil Uji analisis Deskriptif

VARIABEL	MEAN	STD.DEVIATION	MAX	MIN	N
Kompetensi Perangkat Desa (X ₁)	45,11	5,463	54	36	63
Partisipasi Masyarakat (X ₂)	30,16	2,322	35	25	63

Sistem Pengendalian Internal (X_3)	54,46	4,181	63	47	63
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	47,52	2,705	54	44	63

Sumber : Data diolah (2022)

Tabel 4.5 menunjukkan hasil uji analisis deskriptif variabel kompetensi perangkat desa, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jumlah sampel berdasarkan tabel diatas adalah 63. Rata-rata variabel kompetensi perangkat desa menunjukkan angka sebesar 45,11 dengan nilai maximum 54, nilai minimum 36 dengan standar deviasi sebesar 5,463. Pada variabel partisipasi masyarakat menunjukkan rata-rata sebesar 30,16 dengan nilai maximum sebesar 35 dan nilai minimum 25 dengan standar deviasi sebesar 2,322. Pada variabel sistem pengendalian internal menunjukkan rata-rata sebesar 54,46 dengan nilai maximum sebesar 63 dan nilai minimum 47 dengan standar deviasi sebesar 4,181. Pada variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan rata-rata sebesar 47,52 dengan nilai maximum 54 dan nilai minimum 44 dengan standar deviasi sebesar 2,705.

4.4. Uji Kualitas Data

Sebelum data yang terkumpul dianalisis, terlebih dahulu data harus diuji kebenarannya. Adapun uji data yang dimaksud adalah sebagai berikut :

4.4.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji setiap item pertanyaan terkait variabel dalam penelitian. Pengujian ini dilakukan untuk memeriksa kevalidan setiap item pertanyaan kuisisioner. Pertanyaan dikatakan valid apabila mampu menjawab sesuatu yang hendak diukur oleh peneliti.

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan metode *Pearson Product Moment* yaitu dikatakan valid jika memenuhi syarat $R_{hitung} >$

R_{tabel} yang artinya, dalam penelitian variabel yang digunakan terdapat korelasi antar variabel yang dihubungkan. Untuk mengetahui nilai R_{tabel} dalam penelitian ini maka, dapat ditentukan berdasarkan jumlah N atau responden sebesar 63 dengan tingkat kepercayaan 95% atau α 0,05 maka diperoleh nilai R_{tabel} sebesar 0,244. Adapun hasil uji validitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas

VARIABEL	PERTANYAAN	VALIDITAS		KETERANGAN
		R_{tabel}	R_{hitung}	
Kompetensi Perangkat Desa	X _{1.1}	0,244	0,915	VALID
	X _{1.2}	0,244	0,762	VALID
	X _{1.3}	0,244	0,843	VALID
	X _{1.4}	0,244	0,612	VALID
	X _{1.5}	0,244	0,864	VALID
	X _{1.6}	0,244	0,632	VALID
	X _{1.7}	0,244	0,266	VALID
	X _{1.8}	0,244	0,523	VALID
	X _{1.9}	0,244	0,791	VALID
	X _{1.10}	0,244	0,626	VALID
	X _{1.11}	0,244	0,911	VALID
Partisipasi Masyarakat	X _{2.1}	0,244	0,620	VALID
	X _{2.2}	0,244	0,531	VALID
	X _{2.3}	0,244	0,510	VALID
	X _{2.4}	0,244	0,663	VALID
	X _{2.5}	0,244	0,276	VALID
	X _{2.6}	0,244	0,788	VALID
	X _{2.7}	0,244	0,707	VALID

Sistem Pengendalian Internal	X _{3.1}	0,244	0,604	VALID
	X _{3.2}	0,244	0,608	VALID
	X _{3.3}	0,244	0,889	VALID
	X _{3.4}	0,244	0,766	VALID
	X _{3.5}	0,244	0,450	VALID
	X _{3.6}	0,244	0,459	VALID
	X _{3.7}	0,244	0,819	VALID
	X _{3.8}	0,244	0,492	VALID
	X _{3.9}	0,244	0,545	VALID
	X _{3.10}	0,244	0,460	VALID
	X _{3.11}	0,244	0,485	VALID
	X _{3.12}	0,244	0,645	VALID
	X _{3.13}	0,244	0,418	VALID
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Y.1	0,244	0,329	VALID
	Y.2	0,244	0,365	VALID
	Y.3	0,244	0,574	VALID
	Y.4	0,244	0,579	VALID
	Y.5	0,244	0,321	VALID
	Y.6	0,244	0,593	VALID
	Y.7	0,244	0,433	VALID
	Y.8	0,244	0,627	VALID
	Y.9	0,244	0,682	VALID
	Y.10	0,244	0,626	VALID
	Y.11	0,244	0,476	VALID

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan hasil uji validitas tiap butir pertanyaan dari variabel kompetensi perangkat desa, partisipasi masyarakat, sistem pengendalian internal dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pertanyaan dinyatakan valid apabila nilai $R_{hitung} > R_{tabel}$. Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa item pertanyaan setiap variabel dinyatakan valid karena semua pertanyaan menghasilkan nilai $R_{hitung} > R_{tabel}$.

4.4.2. Uji Reliabilitas

Kuisisioner dinyatakan reliabel jika jawaban responden terhadap pertanyaan memiliki konsistensi dari waktu ke waktu. Artinya, ketika variabel ini diuji kembali di masa yang akan datang maka akan menghasilkan kesimpulan dan jawaban yang sama. Pernyataan dikatakan reliabel jika setiap variabel penelitian memiliki *cronbach's alpha* $> 0,60$. Adapun hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.7
Hasil Uji Reabilitas

VARIABEL	CRONBACH'S ALPHA	N of ITEM	KETERANGAN
Kompetensi Perangkat Desa (X ₁)	0,902	11	RELIABEL
Partisipasi Masyarakat (X ₂)	0,668	7	RELIABEL
Sistem Pengendalian Internal (X ₃)	0,851	13	RELIABEL
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,715	11	RELIABEL

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan hasil uji reliabilitas yang menghasilkan kesimpulan bahwa seluruh instrumen penelitian dinyatakan reliabel dengan nilai *Cronbach's alpha* $> 0,60$. Artinya variabel dalam

penelitian ini jika diuji kembali di masa yang akan datang akan menghasilkan jawaban yang konsisten dan serupa.

4.5. Uji Asumsi Klasik

Uji aumsi klasik merupakan analisis yang dilakukan untuk menilai apakah didalam sebuah model regresi linear Ordinary Least Square (OLS) terdapat masalah-masalah asumsi klasik.

4.5.1. Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi dengan normal atau tidak. Data dikatakan normal apabila memiliki nilai signifikan dalam uji *kolmogorov-smirnov* $> 0,05$. Adapun hasil uji normalitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.8

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
Asymp. Sig. (2-tailed)	.284

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.8 hasil uji normalitas dengan metode *One Sample Kolmogorov-Smirnov* menghasilkan kesimpulan bahwa data penelitian dinyatakan berdistribusi normal karena memiliki nilai signifikan $0,284 > 0,05$. Artinya data populasi dalam penelitian ini berdistribusi normal.

4.5.2. Uji Heterokedastistas

Uji Heterokedastistas bertujuan untuk menguji ada tidaknya ketidaksamaan varian dalam persamaan regresi penelitian. Regresi linear dikatakan tidak bergejala heterokedastistas jika nilai signifikan $< 0,05$. Dalam penelitian ini, hasil uji heterokedastistas dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 4.9
Hasil Uji Heterokedastistas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-5.109	4.053		-1.261	.212
X1	-.018	.093	-.051	-.190	.850
X2	-.032	.161	-.039	-.197	.844
X3	.139	.107	.304	1.298	.199

a. Dependent Variable:

LN_RES_2

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa uji heterokedastistas dalam penelitian ini tidak terdapat gejala heterokedastistas karena semua variabel memiliki nilai signifikan $> 0,05$.

4.5.3. Uji Multikolenieritas

Uji Multikolenieritas bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi antar variabel independen (bebas) terhadap variabel independen (bebas) lainnya. Model regresi dikatakan baik apabila memiliki nilai $VIF < 10$ dan memiliki nilai $tolerance > 0,1$. Adapun hasil uji multikolonieritas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.10
Hasil Uji Multikolonieritas

VARIABEL	Tolerance	VIF
Kompetensi Perangkat Desa	0,226	4,432
Partisipasi Masyarakat	0,418	2,394
SPI	0,291	3,438

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.10 hasil uji multikolenieritas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen (bebas) memiliki nilai $VIF < 10$ dan nilai $tolerance > 0,1$ artinya model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat gejala multikolenieritas.

4.6. Pengujian Hipotesis

4.6.1. Analisis Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun hasil uji regresi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.11
Hasil Uji Regresi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	30.917	4.897		6.314	.000
Kompetensi Perangkat Desa	.137	.113	.277	1.215	.229
Partisipasi Masyarakat	.458	.195	.393	2.348	.022
SPI	-.062	.130	-.096	-.478	.635

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan hasil uji regresi linear berganda yang menggambarkan hubungan antara variabel kompetensi perangkat desa, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dilihat sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 \cdot X_1 + b_2 \cdot X_2 + b_3 \cdot X_3 + \epsilon$$

$$Y = 30,917 + 0,137X_1 + 0,458X_2 - 0,062X_3$$

Keterangan :

X_1 = Kompetensi Perangkat Desa

X_2 = Partisipasi Masyarakat

X_3 = Sistem Pengendalian Internal

a = 30,917 bilangan konstan

$b_1 = 0,137$ adalah besarnya koefisien regresi X_1 (Kompetensi Perangkat Desa) artinya setiap peningkatan X_1 sebesar satuan akan meningkatkan Y sebesar 0,137 atau 13%. Dengan demikian akuntabilitas pengelolaan dana desa akan meningkat jika kompetensi perangkat desa memiliki hubungan yang positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

$b_2 = 0,458$ besarnya koefisien X_2 (Partisipasi Masyarakat) yang berarti setiap peningkatan X_2 sebesar satuan maka akan meningkatkan Y sebesar 0,458 atau 45%. Dengan demikian akuntabilitas pengelolaan dana desa akan meningkat jika partisipasi masyarakat memiliki hubungan yang positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

$b_3 = -0,062$ besarnya koefisien X_3 (Sistem Pengendalian Internal) yang berarti setiap peningkatan X_3 sebesar satuan akan menurunkan Y sebesar 0,062 atau 6,2%. Dengan demikian jika sistem pengendalian internal menurun maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa jika sistem pengendalian internal memiliki hubungan yang negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4.6.2. Uji T

Uji T bertujuan untuk membuktikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dapat dikatakan berpengaruh terhadap variabel dependen jika $T_{hitung} > T_{tabel}$ atau nilai signifikan $< 0,05$. Untuk menentukan T_{tabel} pada penelitian ini dapat dilihat dari derajat kepercayaan 5% dengan jumlah responden (N) dan jumlah variabel independen atau dengan rumus $(0,05/2 : n-k-1)$ maka diperoleh T_{tabel} sebesar 2,001. Adapun hasil uji T penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.12
Hasil Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	30.917	4.897		6.314	.000
Kompetensi Perangkat Desa	.137	.113	.277	1.215	.229
Partisipasi Masyarakat	.458	.195	.393	2.348	.022
SPI	-.062	.130	-.096	-.478	.635

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.12 hasil uji T menunjukkan bahwa variabel kompetensi perangkat desa memiliki nilai signifikan $> 0,05$ yang artinya berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa namun tidak signifikan. Variabel partisipasi masyarakat memiliki nilai signifikan $< 0,05$ artinya berpengaruh dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dan variabel sistem pengendalian internal memiliki nilai signifikan $> 0,05$ artinya tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut :

H1 = Kompetensi Perangkat Desa memiliki $T_{hitung} (1,215) < T_{tabel} (2,001)$ dan nilai signifikan $(0,229) > 0,05$. Sehingga variabel kompetensi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, artinya H1 diterima.

H2 = Partisipasi Masyarakat memiliki $T_{hitung} (2,348) > T_{tabel} (2,001)$ dan nilai signifikan $(0,022) < 0,05$. Sehingga variabel partisipasi masyarakat

berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, artinya H2 diterima.

H3 = Sistem Pengendalian Internal memiliki $T_{hitung} (-0,478) < T_{tabel} (2,001)$ dan nilai signifikan $(0,635) > 0,05$. Sehingga variabel sistem pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, artinya H3 ditolak.

4.6.3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi bertujuan untuk menggambarkan sejauhmana variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Dalam penelitian ini koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.13
Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.557 ^a	.310	.275	2.304

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan R square sebesar 0,275 atau setara dengan 27,5%. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi perangkat desa, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh sebesar 27,5% terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dan sisanya sebesar 72,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.7. Pembahasan Penelitian

Penelitian ini melibatkan 63 responden perangkat desa di Kecamatan Ketanggungan untuk memberikan informasi terkait penelitian ini tentang variabel kompetensi perangkat desa, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dari hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh angket pertanyaan yang

diajukan kepada 63 responden dinyatakan valid karena $R_{hitung} > R_{tabel}$. Kemudian dari hasil uji reabilitas data penelitian ini dinyatakan reliabel karena semua pernyataan memiliki *cronbach's alpha* $> 0,60$.

Dalam penelitian ini R square menunjukkan angka sebesar 0,275 atau setara dengan 27,5% artinya variabel kompetensi perangkat desa, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 27,5% dan sisanya sebesar 72,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Dari hasil uji analisis regresi berganda menghasilkan persamaan regresi bahwa $Y = 30,917 + 0,137X_1 + 0,458X_2 + (-0,062)X_3$ dengan nilai konstanta sebesar 30,917. Kemudian dari hasil uji F menunjukkan adanya pengaruh simultan antara variabel X_1 , X_2 , X_3 terhadap variabel Y dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai $F_{hitung} (8,834) > F_{tabel} (2,76)$. Sedangkan hasil uji T berdasarkan hipotesis pada penelitian ini diperoleh sebagai berikut:

4.7.1. Pengaruh kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Untuk variabel kompetensi perangkat desa (X_1) diketahui $T_{hitung} (1,215) < T_{tabel} (2,001)$ dengan nilai signifikan $0,229 > 0,05$ artinya variabel kompetensi perangkat desa berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sarifudin Mada tahun 2017⁷⁷, Dwi Sapartiningsih tahun 2019 dan Enggar Wahyuning Pahlawan tahun 2020 yang menghasilkan kesimpulan bahwa variabel kompetensi perangkat desa berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa⁷⁸. Secara teori, kompetensi merupakan keahlian yang dimiliki oleh seseorang untuk mengerjakan suatu bidang pekerjaan dengan hasil yang baik⁷⁹.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *Agency Theory* yang menyatakan bahwa perangkat desa berperan sebagai *agent* yang

⁷⁷ Sarifudin Mada, dkk, *ibid*.

⁷⁸ Enggar Wahyuning Pahlawan, dkk, *ibid*.

⁷⁹ Dwi Sapartiningsih, dkk, *ibid*.

menjalankan wewenang dari masyarakat (*principal*) untuk mengelola dana desa. Untuk itu, diperlukan kompetensi yang memadai untuk menjalankan amanah tersebut. Jadi semakin tinggi kompetensi yang dimiliki perangkat desa maka akan semakin meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

4.7.2. Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Untuk variabel partisipasi masyarakat memiliki $T_{hitung} (2,348) > T_{tabel} (2,001)$ dengan nilai signifikan $0,022 < 0,05$ artinya variabel partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sarifudin Mada, dkk tahun 2017, Siti Umaira dan Adnan tahun 2021 dan Suci Atiningtyas, dkk tahun 2021 yang menghasilkan kesimpulan bahwa variabel partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa⁸⁰.

Secara Teori, partisipasi masyarakat merupakan peran serta masyarakat dalam urusan pemerintahan daerah atau secara umum partisipasi diartikan sebagai ikut aktifnya masyarakat dalam pengelolaan dana desa⁸¹. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa masyarakat di desa Kecamatan Ketanggungan sudah ikut aktif dalam urusan pemerintah desa. Oleh karena itu, hasil penelitian variabel ini sesuai dengan *Agency Theory* yang menyatakan bahwa masyarakat berperan sebagai pemberi wewenang kepada perangkat desa (*agent*) untuk mengelola dana desa. Untuk itu semakin tinggi partisipasi masyarakat maka akan semakin meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

4.7.3. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Untuk variabel sistem pengendalian internal memiliki $T_{hitung} (-0,478) < T_{tabel} (2,001)$ dengan nilai signifikan $0,635 > 0,05$ artinya variabel sistem pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap

⁸⁰ Suci Atiningtyas, dkk, *ibid.*

⁸¹ Siti Umaira dan Adnan, *ibid.*

akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Enggar Wahyuning Tyas, dkk tahun 2020 yang menghasilkan kesimpulan bahwa variabel sistem pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa⁸².

Secara teori, sistem pengendalian internal diartikan sebagai tindakan yang dilakukan secara konsisten untuk menjaga keamanan aset perusahaan dan menjamin tercapainya tujuan organisasi. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 pasal 55 menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertugas untuk memberikan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Selanjutnya di pasal 112 menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota bertugas untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Desa⁸³.

Kurangnya pemahaman tim pengendalian internal dari perangkat dan BPD terhadap penyajian laporan keuangan atas dana masuk dan dana keluar membuat akuntabilitas sulit tercapai. Selain itu, sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Ketanggungan belum berfungsi secara maksimal. Terbukti dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian desa di Kecamatan Ketanggungan ada yang belum mengimplementasikan sistem pengendalian internal keuangan desa dengan baik karena ketidakpahamannya terhadap sistem tersebut. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, diantaranya sistem pengendalian internal keuangan desa belum memiliki prosedur yang memadai, sarana prasarana pengelolaan dana desa yang belum memadai, serta kurang kritisnya masyarakat terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa⁸⁴.

Akan tetapi, sistem pengendalian internal keuangan desa dapat dikatakan efektif jika didukung dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, latar belakang pendidikan yang baik, pendidikan dan pelatihan

⁸² Enggar Wahyuning Pahlawan, *ibid*.

⁸³ M. Khoiru Rusydi, *Sistem Pengendalian Internal Keuangan Desa*, <https://www.iainjawa Timur.or.id/course/interest/detail/19> , Ikatan Akuntansi Indonesia Wilayah Jawa Timur, diakses 19 Febuari 2022.

⁸⁴ Priyono, M.Eko Hendro, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penggunaan Siskeudes di Kabupaten Brebes*, Universitas Peradaban.: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Thesis, 2018.

yang memadai serta didukung dengan sarana dan prasarana pengelolaan dana desa yang lengkap. Sejalan dengan *Agency Theory* yang menyatakan bahwa pengendalian internal dijadikan sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengawasi hubungan yang terjalin antara *agent* dengan *principal*.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa variabel kompetensi perangkat desa memiliki nilai $T_{hitung} (1,215) < T_{tabel} (2,001)$ dan nilai signifikan $0,229 > 0,05$ artinya variabel kompetensi perangkat desa secara parsial berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa namun tidak signifikan. Hal ini dikarenakan kompetensi yang dimiliki perangkat desa di Kecamatan Ketanggungan sudah cukup baik. Akan tetapi, perangkat desa harus tetap meningkatkan kompetensi yang dimilikinya melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan Pemerintah agar dapat menyusun pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dengan lebih baik lagi. Sehingga hasil penelitian ini mendukung *Agency Theory*.
2. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat memiliki nilai $T_{hitung} (2,348) > T_{tabel} (2,001)$ dengan nilai signifikan $0,022 < 0,05$ artinya variabel partisipasi masyarakat secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dikarenakan tingginya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa di Kecamatan Ketanggungan sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Ketanggungan. Hasil penelitian ini mendukung *Agency Theory*.
3. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal memiliki nilai $T_{hitung} (-0,478) < T_{tabel} (2,001)$ dengan nilai signifikan $0,635 > 0,05$ artinya variabel sistem pengendalian internal secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dikarenakan lemahnya pemahaman tim pengendalian internal baik dari pihak perangkat maupun BPD dalam menyajikan laporan keuangan yang berkaitan dengan dana masuk dan

dana keluar Selain itu, belum berfungsinya sistem pengendalian internal secara maksimal membuat sistem pengendalian internal di desa Kecamatan Ketanggungan belum mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Terbukti dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian desa yang berada di Kecamatan Ketanggungan ada yang belum mengimplementasikan sistem pengendalian internal dengan baik karena ketidapahamannya terhadap sistem tersebut. Akan tetapi, jika pengendalian internal keuangan desa didukung dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, pendidikan dan pelatihan yang memadai serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan tercapai. Hasil penelitian ini tidak mendukung *Agency Theory*.

5.2. Saran

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan mencari variabel independen lainnya yang memiliki pengaruh tingkat signifikansi yang lebih besar terhadap variabel dependen.
2. Memperluas penelitian dengan menambah variabel lain yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Memperluas objek penelitian dengan menambah objek lebih dari satu Kecamatan atau bahkan satu Kabupaten agar diperoleh hasil penelitian yang lebih relevan.

5.3. Keterbatasan Penelitian

1. Variabel independen yang diteliti dalam penelitian ini hanya memiliki pengaruh signifikansi sebesar 27,5% terhadap variabel dependen.
2. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini masih terbatas hanya mencakup tiga variabel saja yaitu kompetensi perangkat desa, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian internal yang sebenarnya masih banyak lagi terkait variabel yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Objek dalam penelitian ini hanya mencakup satu Kecamatan saja yang ada di Kabupaten Brebes.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Putu Wiwik Anak, I Wayan Wiasta, Ketut Sukawati lanang, Pertanggungjawaban Alokasi Dana desa Pelaga Terkait Program Pemberian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bandung, *Universitas Mahasaraswati Denpasar*, Fakultas Hukum, Skripsi, h.109-122.
- Ahmad bin Musthafa Al-Farran, Syaikh. 2007. Tafsir Imam Syafi'i, Jilid 2, Almahira. h. 502.
- Ahmad Yani Andi, Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, Konsep Value For Money, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Digital (Di Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Selatan), *Universitas Muhammadiyah Makassar* : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, skripsi, (2020).
- Ainurrohma Romantis Puteri, Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Penarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014, *Universitas Jember* Fakultas Ekonomi, Skripsi, (2015).
- Arafat Yaser, Genjor Penyerapan Dana Desa, Bupati Gelar Rakor, <https://brebeskab.go.id/index.php/content/1/genjot-penyerapan-dana-desa-bupati-gelar-rakor> diakses tanggal 18 Januari 2022.
- Arief Arfiansyah Mufti, Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan dana Desa, *Journal Of Islamic Finance And Accounting*, Vol.3, No.1,(2020): 67-82.
- Arifin Faiz, Ihda. 2020. Perangkat Dasar kerangka Akuntansi Berlandaskan Syariah. *Yogyakarta*. Gajdah Mada University Press. h. 118-128.
- Arifin, M. Zaenal, <https://jateng.tribunnews.com/2019/11/21/dari-34-desa-miskin-di-brebes-10-di-antaranya-kategori-sangat-miskin?page=2>, diakses 16 Maret 2022.
- Arisman, Aries Putriyani, Ahmad Afandi, Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Dalam Perspektif Islam, Akuntabilitas : *Jurnal Ilmu dan Akuntansi*, Vol.11, No.2, (2018): 293-304.

- Atiningsih, Suci, and Aulia Cahya Ningtyas, 'Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali)', *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10.1 (2019): 14-25.
- Avellyni Leda Making Andreani, Nur Handayani, Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 10, No.10, (2021).
- Ayu Anggreni Putri Ade, I Wayan Suidiana, and I Putu Deddy Samtika Putra Putra, Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli.', Hita Akuntansi Dan Keuangan *Universitas Hindu Indonesia*, April, (2021) : 699–730.
- Ayuning Astuti Ely, *Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas dan Peran Perangkat desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, Universitas Muhammadiyah Magelang , Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2019.
- Badan Pusat Statistik, *Kemiskinan 2019-2021*,
<https://jateng.bps.go.id/indicator/23/34/1/kemiskinan.html> diakses 18 Januari 2022.
- Badan Pusat Statistik, *Kemiskinan 2019-2021*,
<https://jateng.bps.go.id/indicator/23/34/1/kemiskinan.html> diakses 18 Januari 2022.
- Badan Pusat Statistik, 'Jumlah Penduduk Menurut Desa Di Kecamatan Ketanggungan 2020', *Bps.go.id*, 2020
 <<https://brebeskab.bps.go.id/statictable/2021/08/12/1922/jumlah-penduduk-menurut-desa-di-kecamatan-ketanggungan-2020.html>> [accessed 19 January 2022]
- Cori Pradna Paramita Catarina, Pengaruh Kompetensi Individu, Orientasi Kewirausahaan, dan Pesaing Dalam Mencapai Keunggulan Bersaing Melalui Kualitas Produk Studi Pada UKM Furniture Di Kota Semarang, *DeReMa Jurnal Manajemen*, Vol.10, No.1, 2015.

- Dharmawati Tuti, dkk, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Village Fund Management Accountability)*, Jurnal Studi Islam Lintas Negara, Vol. 3, No.1, (2021) : 34-42.
- Dwi Setiawan Novindra, Nur Laila Yuliani, *Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa se-Kecamatan Mungkid)*, Universitas Muhamadiyah Magelang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2017.
- Eko Nugroho Fajar, 'Dana Desa Di Brebes Sudah Tersalurkan Rp 61 Miliar', *Kumparan.com*, 2018 <<https://kumparan.com/panturapost/di-brebes-dana-desa-rp-61-miliar-sudah-tersalurkan-ke-17-kecamatan-27431110790536733/full>> [accessed 20 January 2022].
- Fitri Puspa Dwi and Riky Agung Prasetyo, 'Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa', *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20.2 (2020), 281 <<https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7894>>.
- Ghoffer, Abdul, Abdurrahim Mu'thi, Abu Ihsan Al- Atsari. 2004. Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 8. *Pustaka Imam Asy- Syafi'i*. h.82.
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/partisipasi_masyarakat_Tanggal_16_Januari_2022.
- Ida Yesinia Nur, Norita Citra Yuliarti, Dania Puspitasari, Analisis Fkator yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*. Vol.10, No.1, (2018) : 105-112.
- Ikromul Mufidah Putri Irma, Akuntabilitas Kinerja Pegawai Dalam Meningkatkan Pelayanan Kebutuhan Lanjut Usia (Lansia), *Universitas Islam Negeri Sultan Syarief Kasim Riau* Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Skripsi, 2021.
- 'Ini Hasil Dana Desa Sejak 2015', *Kemenkeu.go.id*, 2019 <<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-hasil-dana-desa-sejak-2015/>> [accessed 20 January 2021]
- Kartika Anjani Ajeng, Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa, *Jurist Diction*, Vol. 2, No.3, (2019) : 747-770.

Khoiru Rusydi M., Sistem Pengendalian Internal Keuangan Desa, <https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/19> , *Ikatan Akuntansi Indonesia Wilayah Jawa Timur*, diakses 19 Februari 2022.

Lembaran Negara Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, 2017, diakses 18 Januari 2022.

Kabupaten Kuningan, <https://www.kuningankab.go.id/berita/kepala-desa-dan-sekdes-harus-mempunyai-kompetensi>, diakses 16 Maret 2022

Khoiru Rusydi M., IAI Jawa Timur, *Sistem Pengendalian Internal Keuangan Desa*, <https://www.iaijawatimur.or.id> diakses 14 Januari 2022.

Kusumastuti, Adhi, Ahmad Mustamil Khoiron, Taofan Ali Achmadi. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta. CV Budi Utama.

Komang Ayu Julia Praba Dewi Ni, Gayatri, Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, *E Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol. 26 No. 2 Februari (2019) : 1269-1298.

Mada, Sarifudin, Lintje Kalangi, and Hendrik Gamaliel, 'Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing 'Goodwill'*, 8.2 (2017), 106–15 <<https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>>

Martini Rita, Naufal Lianto, Sukmini Hartati, Zulkifli Zulkifli, Endah Widyastuti, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa, *Jurnal Akademi Akuntansi* Vol.2, No.1, (2019) : 06-123.

Mualifu, Ahmad Guspul, Hermawan, Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga), *Journal Of Economic, Business and Engineering*, Vol.1, No.1,(2019).

Nugroho, Fajar Eko, 'Dana Desa Di Brebes Sudah Tersalurkan Rp 61 Miliar', *Kumparan.com*, 2018 <<https://kumparan.com/panturapost/di-brebes-dana->

desa-rp-61-miliar-sudah-tersalurkan-ke-17-kecamatan-27431110790536733/full> [accessed 20 January 2022]

- Nurkhasanah, 'Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang)', *Skripsi, UIN Walisongo Semarang*, 53.9 (2019), 1689–99
- Nurkhasanah, Isnaeni, 'Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan Dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Pringsurat)', *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah. Magelang*, 53.9 (2019), 1689–99
- Nur Aziis Muhammad, Sawitri Dwi Prastiti, *Faktor- faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa*, *Jurnal Akuntansi Aktual*, Vol. 6, No.2, (2019).
- Nur Walyati Fifit, Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empirisa Desa Se -Kecamatan Muntilan) , *Universitas Muhammadiyah Magelang : Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, Skripsi, (2020).
- Onsardi, Marini, Ezizia Selvia, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Desa di Taba Padang Reja Kecamatan Huku Palik Kabupaten Bengkulu Utara, *Bilancia : Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol. 4, No.3. (2020) : 248-261.
- Pahlawan, Enggar Wahyuning, Anita Wijayanti, and Suhendro Suhendro, 'Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa', *Indonesia Accounting Journal*, 2.2 (2020), 162 <<https://doi.org/10.32400/iaj.29261>>
- Podami Trilusi, *Pengawasan Pendidikan Mengacu Kepada Al-Qur'an dan Hadits*, *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 3, No.2, 2019, h.295-320.
- Priyono, M.Eko Hendro, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penggunaan Siskeudes di Kabupaten Brebes, *Universitas Peradaban.: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Thesis*, (2018).

- Puspa, Dwi Fitri, and Riky Agung Prasetyo, 'Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa', *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20.2 (2020), 281
<<https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7894>>
- Putri, Ade Ayu Anggreni, I Wayan Suidiana, and I Putu Deddy Samtika Putra Putra, 'Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli.', *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, April, 2021, 699–730
- Putri Kinanti Syafira, Berlian Permadani Satria Putri, Pengaruh Media Sosial Zappoid@ Terhadap Brand Equity Zap Clinic, *Jurnal Komunikasi*, Vol.9, No.1, (2017) : 53-64.
- Putri Soetrisno Annisa, Alini Gilanag, Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Di PT Telekomunikasi Indonesia TBK Witel Bandung), *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, Vol. VIII, No. 1, (2018).
- Qardhawi, Yusuf. 2004. Peran Nilai dan Moral Dalam perekonomian Islam. *Jakarta*, Robbani Press, 2004, h. 151.
- Redaksi Dalam Islam, *19 Ayat Al-Qur'an Tentang Tanggungjawab*, Dalamislam.com, <https://dalamislam.com/landasan-agama/al-quran/ayat-al-quran-tentang-tanggung-jawab>, diakses 17 Januari 2022.
- Restu Aprilya Kartika, Astri Fitria, Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol.9, No. 3, (2020).
- Rismawati Tika, Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem penegndalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Di Kecamatan Bandongan), *Universitas Muhammadiyah Magelang , Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, Skripsi, (2019)

- Rizkiyah Wakhidatul, Peran Perangkat Desa, dan Partisipasi masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, *Universitas Muhammadiyah Magelang : Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, (2018).
- Rodliyah Novita Siti, I Wayan Swendra, Ni Nyoman Yuliantini, Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada SD N 1 Bebalang Bangli Tahun 2015, *e-Journal Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen*, Vol.7, (2019) : 80-88.
- Roflin, Eddy. Iche Andriyani Liberty. Pariyana. 2021. Populasi, Sampel, Variabel Dalam Penelitian Kedokteran. *Pekalongan*. PT Nasya Expanding Management.
- Shihab, Quraish. dkk, 2007. Enslklopedia Al'Quran :Kajian Kosakata,Cet I. *Jakarta*. Lentera Hati.
- Shihab, Quraish. 2012. Al-Lubab Makna, Tujuan, dan Pelajaran Dari Surah-Suah Al-Qur'an. *Tangerang*. Lentera Hati. h. 279.
- Sapartiningsih Dwi, Suharno, Djoko Kristianto, Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* Vol. 14 No. 1 Maret (2018) :100-114.
- Sj. Indradi, Sjamsiar. 2020. Akuntabilitas Konsep Dan Implementasi. *Malang*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sutanto Heri, Pancawati Hardiningsih, Akuntabilitas Pengelolaan BLT-Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19, *InFestasi*, Vol. 17, No.1, (2021) : 1-10.
- Tayubi Kuntoro, <https://www.medcom.id/nasional/daerah/dN6219vN-34-desadi-brebes-masuk-kategori-miskin>, 21 November 2019, diakses 16 Febuari 2022.
- Umaira Siti, Adnan, Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi (JIMEKA)*, Vol.4, No.3, (2019) : 471-481.
- Wahyuning Pahlawan Enggar, Anita Wijayanti, and Suhendro Suhendro, Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal,

- Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa', *Indonesia Accounting Journal*, 2.2 (2020), 162.
- Widyatama Arif, dkk, Pengaruh Kompoetensi dan Sistem Pengendalian Internal Tewrhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, Vol.2, No. 2, (2017).
- Widya Yahya I, Pengaruh Akuntabilitas, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Pegawai Di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo), *Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, Skripsi, (2021)
- Wikipedia, 'Ketanggungan, Brebes', *Wikipedia.org*, 2021 <https://id.wikipedia.org/wiki/Ketanggungan,_Brebes> [accessed 19 January 2022]
- Wulandari Niken, Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi dan Sistem pengendalian Internal Terhadap Upaya Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Empat Belas Desa Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Gunungkidul, *Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, Skripsi, (2021).
- Yulitasari, Wido Prananing Tyas, Dana Desa Dan Status Desa di Provinsi Jawa Tengah, *Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan*, Vol.4, No.2, (2020) : 74-83.
- Yunus, Mahmud. . 2004. Tafsir Qur'an Karim. *Jakarta*. PT Hidakarya Agung, 2004. h.118-119.
- Yusup Febrinawati, Uji Validitas dan Reabilitas Instrumen Penelitian Kuantitatif, *Universitas Islam Negeri Antasari, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan*, (2018).
- Zaenal Arifin M., <https://jateng.tribunnews.com/2019/11/21/dari-34-desa-miskin-di-brebes-10-di-antaranya-kategori-sangat-miskin> , 21 November 2019, diakses 16 Febuari 2022.
- Zulkifl, Zulkifl, Sandrayati Sandrayati, and Neni Ariani, 'Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi

Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim', *JEMBATAN (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Auditing, Dan Akuntansi)*,

6.1 (2021), 26–38 <<https://doi.org/10.54077/jembatan.v6i1.55>>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Yth. Bapak/Ibu Pejabat/Pegawai Pemerintah Desa.....

Di Tempat

Hal: Permohonan Mengisi Kuesioner Penelitian

Dengan hormat,

Dalam rangka penyusunan skripsi guna memenuhi syarat menyelesaikan studi program S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, peneliti :

Nama : Selinda Rahmaidah

NIM : 1805046114

Program Studi: : Akuntansi Syariah

Alamat : Desa Klikiran Rt 6/ Rw 2 Kecamatan Jatibarang
Kabupaten Brebes

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Partisipasi Masyarakat dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”.

Dengan ini, peneliti mohon partisipasi Bapak/Ibu untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang tersedia dalam kuesioner penelitian ini. Semua jawaban yang dipilih adalah benar. Maka dari itu, peneliti mengharapkan Bapak/Ibu memberikan jawaban sesuai dengan kondisi tempat Bapak/Ibu bekerja. Peneliti sangat menghargai partisipasi Bapak/Ibu sebagai responden dalam penelitian ini. Informasi yang Bapak/Ibu berikan akan dijaga kerahasiannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Mengingat keberhasilan penelitian ini akan sangat bergantung kepada kelengkapan jawaban, dimohon dengan sangat agar Bapak/Ibu dapat memberikan jawaban dengan lengkap.

Terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu yang telah mengisi kuesioner ini.

Semarang, Januari 2022

Peneliti

Selinda Rahmaidah

NIM.1805046114

KUESIONER PENELITIAN

Sebelum mengisi kuesioner, dimohon untuk memberikan data-data yang ada dibawah ini:

Nama :

Jenis Kelamin :

Umur :

Pendidikan Terakhir :

Jabatan/ Pangkat :

Lama bekerja di posisi saat ini :

DAFTAR PERTANYAAN

Petunjuk Pengisian

Jawablah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan kondisi tempat Bapak/Ibu bekerja dan pilihlah jawaban dibawah ini dengan memberi tanda ceklist pada table yang sudah tersedia.

Alternative Jawaban

1. Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Tidak Setuju (TS)
3. Netral (N)
4. Setuju (S)
5. Sangat Setuju (SS)

A. Kompetensi Perangkat Desa

NO	Pertanyaan	1	2	3	4	5
		STS	TS	KS	S	SS
	Pemahaman					
1.	Perangkat desa memahami Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.					
2.	Perangkat desa dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman melalui pelatihan-pelatihan teknis terkait pengelolaan dana desa.					
3.	Perangkat desa memahami ilmu Akuntansi.					
	Kemampuan (<i>Skill</i>)					
4.	Perangkat desa mampu menemukan solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam bekerja.					
5.	Kemampuan dalam mengelola dana desa harus dimiliki setiap perangkat desa.					
	Sikap					
6.	Dalam melakukan pekerjaan, perangkat desa harus saling membantu satu sama lain.					
7.	Pelayanan terhadap masyarakat harus dilakukan dengan penuh kesopanan dan keramahan.					
	Keahlian Teknis					

8.	Perangkat desa dapat mengoperasikan komputer dengan baik khususnya <i>Ms.Excel</i> .					
9.	Perangkat desa melakukan pembukuan mendasar berdasarkan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah).					
	Inisiatif Dalam Bekerja					
10.	Perangkat desa berangkat kerja tepat waktu dan pulang kerja sesuai dengan jam kerja pegawai.					
11.	Perangkat desa inisiatif dalam menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai.					

B. Partisipasi Masyarakat

NO	Pertanyaan	1	2	3	4	5
		STS	TS	KS	S	SS
	Pengambilan Keputusan					
1.	Masyarakat ikut aktif terlibat dalam pengambilan keputusan penyusunan program-program desa yang menyangkut penggunaan anggaran dana desa.					
2.	Masyarakat berpartisipasi dalam memberikan masukan kepada pemerintah desa.					
	Penyusunan Anggaran					
3.	Masyarakat mengusulkan rencana Anggaran alternatif untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Rencana Anggaran Desa untuk diajukan ke Pemerintah Daerah.					
4.	Masyarakat terlibat langsung dalam					

	pengambilan keputusan penyusunan program-program penggunaan dana desa.					
	Pelaksanaan Anggaran					
5.	Masyarakat memberikan penilaian terhadap pelaksanaan setiap program yang menyangkut anggaran dana desa.					
6.	Masyarakat ikut aktif dalam mengawasi dan melaporkan pelaksanaan anggaran desa.					
7.	Masyarakat memberikan penghargaan atas keberhasilan pemerintah desa dalam mengelola anggaran dana desa.					

C. Sistem Pengendalian Internal

NO	Pertanyaan	1	2	3	4	5
		STS	TS	KS	S	SS
	Lingkungan Pengendalian					
1.	Setiap bagian telah memiliki standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi.					
2.	Struktur organisasi menggambarkan pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab pegawai.					
3.	Memiliki rencana pengelolaan keuangan desa atau mengurangi resiko pelanggaran.					
	Penilaian Resiko					
4.	Telah melakukan penilaian resiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya berbagai					

	pelanggaran terhadap sistem akuntansi.					
5.	Perangkat desa selalu menerapkan perilaku dan norma yang baik dalam setiap kegiatan.					
6.	Aparat pengawas internal cukup memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah Desa.					
	Aktivitas Pengendalian					
7.	Transaksi yang di entri dan di proses dalam komputer adalah transaksi yang telah diotorisasi.					
8.	Kebijakan dan prosedur pengamanan aset telah diimplementasikan dengan baik.					
9.	Melakukan pengamanan aset yang dimiliki untuk menghindari <i>Fraud</i> (kesalahan yang disengaja).					
	Informasi dan Komunikasi					
10.	Pengguna anggaran masing-masing bagian telah menyampaikan surat pertanggungjawaban (SPJ) tepat pada waktunya.					
11.	Setiap informasi telah disediakan tepat pada waktunya dan memungkinkan untuk dilakukan tindakan korektif secara tepat.					
	Pemantauan					
12.	Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Brebes selalu menindaklanjuti setiap temuan/review saran yang diberikan BPK maupun inspektorat.					

13.	Kepala Desa melakukan evaluasi secara rutin atas pengendalian internal di Pemerintahan Desa.					
-----	--	--	--	--	--	--

D. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

NO	Pertanyaan	1	2	3	4	5
		STS	TS	KS	S	SS
	Kejujuran Dan Keterbukaan					
1.	Kejujuran dan keterbukaan kepala desa dalam mengungkapkan kondisi laporan keuangan ditunjukkan melalui papan informasi.					
2.	Pengelolaan dana desa disusun secara jujur dan sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan desa.					
3.	Pengelolaan dana desa selalu disajikan secara terbuka dan transparansi.					
	Kepatuhan Dalam Pelaporan					
4.	Penyusunan laporan keuangan desa dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.					
5.	Dalam penyampaian laporan keuangan desa dilakukan secara tepat waktu dan menyeluruh.					
	Kesesuaian Prosedur					
6.	Penyusunan dan penyampaian laporan keuangandes desa dilakukan sesuai dengan prosedur undang-undang desa.					
7.	Perangkat desa telah mengikuti prosedur pelaksanaan pendapatan, belanja desa dan pembiayaan desa sesuai dengan jumlah yang ditentukan.					
	Kecukupan Informasi					
8.	Dana desa yang dipakai selalu dicatat dengan					

	jujur dan transparan.					
9.	Masyarakat selalu mendapatkan informasi tentang anggaran pengelolaan dana desa.					
	Ketepatan Penyampaian Laporan					
10.	Pengumuman tentang penyaluran dana desa selalu bisa didapat setiap waktu.					
11.	Perangkat desa tepat waktu dalam menyusun laporan keuangan dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan desa.					

DOKUMENTASI PENGISIAN KUISIONER







JAWABAN RESPONDEN

NO	KOMPETENSI PERANGKAT DESA											TOTAL
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X1.11	
1	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	5	48
2	3	4	3	4	3	4	5	3	2	3	3	37
3	3	4	3	4	3	4	5	3	2	3	3	37
4	3	4	3	4	3	4	4	3	2	3	3	36
5	3	4	2	4	3	4	5	5	3	2	3	38
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
7	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	47
8	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	47
9	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	4	44
10	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	54
11	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	4	44
12	5	5	4	4	4	5	5	4	3	4	4	47
13	5	5	5	5	5	5	5	4	4	3	4	50
14	5	5	5	5	5	5	5	4	4	3	4	50
15	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	5	52
16	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	47
17	5	5	5	4	4	5	5	5	4	3	5	50
18	4	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5	51
19	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	45
20	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	5	48
21	3	4	2	4	3	4	4	5	3	2	3	37
22	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	5	48
23	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	4	44
24	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	45
25	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	53
26	3	4	2	4	3	4	4	5	3	2	3	37
27	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	45
28	3	4	3	4	3	4	5	3	2	3	3	37
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	45
30	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	53
31	4	4	3	4	3	5	5	5	5	4	4	46
32	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	47
33	5	5	4	4	4	4	5	4	5	4	5	49
34	3	4	4	4	3	4	5	3	2	3	3	38
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	45
36	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	54
37	3	4	3	4	4	4	4	3	2	3	3	37
38	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	45
39	5	5	4	5	5	5	5	5	4	3	5	51

40	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	45
41	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	5	48
42	3	4	2	4	3	4	5	5	3	2	3	38
43	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	52
44	3	4	3	4	3	4	5	4	2	3	3	38
45	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	45
46	3	4	4	4	3	4	5	3	2	3	3	38
47	5	5	5	5	4	5	5	4	4	3	4	49
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
49	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	47
50	3	4	4	4	3	4	4	5	3	2	3	39
51	3	4	3	4	3	4	5	3	2	3	3	37
52	3	4	3	4	3	4	4	3	2	3	3	36
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
54	3	4	3	4	3	4	5	3	4	3	3	39
55	5	5	4	5	5	5	5	5	4	3	5	51
56	3	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	46
57	5	4	4	3	5	4	5	5	4	3	4	46
58	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	5	52
59	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	45
60	3	4	3	4	3	4	5	3	2	3	3	37
61	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	5	48
62	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	54
63	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	5	52

NO	PARTISIPASI MASYARAKAT							TOTAL
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	
1	5	4	4	4	5	5	5	32
2	4	4	4	4	5	4	3	28
3	4	4	5	4	3	4	5	29
4	4	4	4	4	5	4	3	28
5	4	4	4	4	5	4	3	28
6	5	5	4	4	4	4	4	30
7	5	5	4	4	4	4	4	30
8	5	5	4	4	4	4	4	30
9	2	4	4	4	4	3	4	25
10	4	5	4	5	5	4	5	32
11	2	4	4	4	4	3	4	25
12	4	4	5	5	5	4	4	31
13	5	5	5	5	5	5	4	34
14	5	5	5	5	5	5	4	34
15	4	5	4	5	5	4	5	32
16	5	5	4	4	4	4	4	30
17	4	4	5	5	5	5	5	33
18	4	5	5	5	4	4	4	31
19	5	5	4	4	4	4	4	30
20	5	4	4	4	5	5	5	32
21	4	4	4	4	5	4	3	28
22	5	4	4	4	5	5	5	32
23	2	4	4	4	4	3	4	25
24	5	5	4	4	4	4	4	30
25	4	5	4	5	4	4	5	31
26	4	4	4	4	5	4	3	28
27	5	5	4	4	4	4	4	30
28	4	4	4	4	5	4	3	28
29	4	4	4	4	4	4	4	28
30	4	5	4	5	5	4	5	32
31	5	4	5	5	3	4	4	30
32	5	5	4	4	4	4	4	30
33	5	4	4	4	5	5	5	32
34	4	4	4	4	5	4	3	28
35	5	5	4	4	4	4	4	30
36	5	5	5	5	5	5	5	35
37	4	4	4	4	5	4	3	28
38	4	4	4	4	4	4	4	28
39	4	5	4	5	5	4	5	32
40	5	5	4	5	4	4	4	31
41	5	4	4	4	5	5	5	32

42	4	4	4	4	5	4	3	28
43	5	5	5	5	5	5	5	35
44	4	4	4	4	5	4	3	28
45	5	5	4	4	4	4	4	30
46	4	4	4	4	5	4	3	28
47	5	5	5	5	5	5	4	34
48	4	4	4	4	4	4	4	28
49	5	4	4	4	5	5	5	32
50	4	4	4	4	5	4	3	28
51	4	4	4	4	5	4	3	28
52	4	4	4	4	5	4	3	28
53	5	5	4	4	4	4	4	30
54	4	4	4	4	5	4	3	28
55	4	5	4	5	5	4	5	32
56	4	5	5	4	4	5	5	32
57	4	4	5	5	5	5	5	33
58	4	5	4	5	5	4	5	32
59	5	5	4	4	4	4	4	30
60	4	4	4	4	5	4	3	28
61	5	4	4	4	5	5	5	32
62	4	5	4	5	5	4	5	32
63	4	5	4	5	5	4	5	32

NO	SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL													
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	X3.10	X3.11	X3.12	X3.13	TOTAL
1	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	3	48
2	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	3	47
3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	49
4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	49
5	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	49
6	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	55
7	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	54
8	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	5	57
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	53
10	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	3	4	54
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	54
12	4	4	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	3	58
13	4	5	4	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	57
14	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	3	4	4	58
15	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	58
16	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	56
17	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	58
18	5	5	5	4	4	4	4	5	4	5	4	5	5	59
19	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	56
20	4	4	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	60
21	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	49
22	5	4	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	4	60
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	54
24	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	56
25	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	5	5	5	61
26	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	49
27	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	56
28	4	4	3	3	4	4	3	4	5	4	4	4	4	50
29	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	53
30	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	5	5	5	61
31	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	55
32	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	56
33	5	4	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	61
34	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	49
35	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	56
36	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	58
37	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	5	4	4	50
38	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	53
39	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	5	5	5	61
40	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	56
41	5	4	5	4	5	3	4	4	5	4	4	4	5	56

42	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	49
43	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	58
44	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	49
45	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	56
46	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	49
47	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	63
48	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	53
49	4	4	5	4	5	5	4	4	5	4	4	5	5	58
50	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	49
51	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	49
52	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	49
53	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	56
54	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	49
55	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4	3	56
56	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	56
57	5	4	4	3	4	4	4	5	5	4	4	4	5	55
58	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	57
59	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	55
60	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	49
61	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	5	50
62	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	4	5	4	60
63	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4	5	5	3	57

NO	AKUNTABILITAS											
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	Y.11	TOTAL
1	5	5	4	4	4	5	4	4	5	5	5	50
2	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	48
3	5	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	45
4	5	5	5	4	5	4	4	4	5	4	5	50
5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	45
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
8	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	48
9	5	5	4	4	3	4	4	5	4	5	4	47
10	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	4	48
11	5	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4	48
12	4	3	5	5	4	4	3	5	5	5	4	47
13	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	54
14	4	4	4	4	5	5	5	4	5	4	4	48
15	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	4	51
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
17	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	47
18	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	51
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
20	5	5	4	4	4	5	4	4	5	5	5	50
21	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	47
22	5	5	4	4	4	5	4	4	5	5	5	50
23	5	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4	48
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
25	4	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	50
26	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	47
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
28	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	47
29	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	45
30	4	5	5	5	4	4	4	5	5	4	4	49
31	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	51
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
33	5	5	4	4	4	5	4	4	5	5	5	50
34	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	47
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
36	5	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	49
37	5	5	4	4	4	4	4	4	3	5	3	45
38	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	45
39	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	4	50
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	45
41	5	5	4	4	4	5	4	4	5	5	5	50

42	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	47
43	5	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	49
44	5	5	4	4	4	4	4	4	3	5	4	46
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
46	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	47
47	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	54
48	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	45
49	5	5	4	4	4	5	4	4	5	5	5	50
50	5	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	45
51	5	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	45
52	5	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	45
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
54	5	5	4	4	5	4	4	4	3	4	4	46
55	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	4	51
56	4	5	4	5	5	4	4	5	4	5	5	50
57	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	51
58	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	4	50
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
60	5	5	4	4	4	4	4	4	3	4	5	46
61	5	5	4	5	4	5	4	4	5	5	5	51
62	5	5	5	4	5	4	4	5	4	5	4	50
63	5	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	50

OUTPUT SPSS

**HASIL UJI SPSS ATAS JAWABAN RESPONDEN TERHADAP
PERTANYAAN KUISIONER**

HASIL UJI ANALISIS DESKRIPTIF

A. KOMPETENSI PERANGKAT DESA

Statistics

	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X1.11	TOTAL
N Valid	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean	4.10	4.38	3.90	4.22	4.03	4.33	4.68	4.13	3.71	3.54	4.08	45.11
Median	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	45.00
Mode	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	45
Std. Deviation	.817	.490	.797	.456	.761	.475	.469	.684	.941	.779	.789	5.463
Variance	.668	.240	.636	.208	.580	.226	.220	.467	.885	.607	.623	29.842
Range	2	1	3	2	2	1	1	2	3	3	2	18
Minimum	3	4	2	3	3	4	4	3	2	2	3	36
Maximum	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	54
Sum	258	276	246	266	254	273	295	260	234	223	257	2842

B. PARTISIPASI AMSYARAKAT

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	TOTAL
N	Valid	63	63	63	63	63	63	63	63
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mean	4.32	4.46	4.19	4.32	4.59	4.19	4.10	30.16
	Median	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	30.00
	Mode	4	4	4	4	5	4	4	28
	Std. Deviation	.714	.502	.396	.469	.557	.503	.777	2.322
	Variance	.510	.252	.157	.220	.311	.253	.604	5.394
	Range	3	1	1	1	2	2	2	10
	Minimum	2	4	4	4	3	3	3	25
	Maximum	5	5	5	5	5	5	5	35
	Sum	272	281	264	272	289	264	258	1900

C. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	X3.10	X3.11	X3.12	X3.13	TOTAL
N	Valid	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mean	4.46	4.43	4.05	3.83	4.40	4.11	3.87	4.21	4.27	4.10	4.22	4.32	4.21	54.46
	Median	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	56.00
	Mode	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49
	Std. Deviation	.502	.499	.771	.610	.493	.444	.635	.408	.447	.346	.522	.591	.572	4.181
	Variance	.252	.249	.594	.372	.243	.197	.403	.166	.200	.120	.272	.349	.328	17.478
	Range	1	1	2	2	1	2	2	1	1	2	2	2	2	16
	Minimum	4	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	47

	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.010	.007	.001	.006	.000	.000
	N	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
X1.3	Pearson Correlation	.756*	.632*	1	.547*	.749*	.511*	.177	.230	.608*	.551*	.730*	.843**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.166	.070	.000	.000	.000	.000
	N	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
X1.4	Pearson Correlation	.505*	.626*	.547*	1	.537*	.546*	.184	.270*	.301*	.202	.443*	.612**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.148	.032	.017	.113	.000	.000
	N	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
X1.5	Pearson Correlation	.747*	.530*	.749*	.537*	1	.639*	.164	.426*	.643*	.514*	.721*	.864**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.199	.001	.000	.000	.000	.000
	N	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
X1.6	Pearson Correlation	.457*	.485*	.511*	.546*	.639*	1	.265*	.463*	.325*	.203	.401*	.632**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.036	.000	.009	.110	.001	.000
	N	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
X1.7	Pearson Correlation	.332*	.324*	.177	.184	.164	.265*	1	-.073-	-.026-	.035	.156	.266*
	Sig. (2-tailed)	.008	.010	.166	.148	.199	.036		.567	.839	.785	.221	.035
	N	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
X1.8	Pearson Correlation	.411*	.335*	.230	.270*	.426*	.463*	-.073-	1	.509*	.021	.459*	.523**

X2. Pearson 2	Correlation Sig. (2-tailed) N	.395** .001 63	1 63	.120 .350 63	.465** .000 63	-.232- .067 63	.030 .813 63	.382** .002 63	.531** .000 63
X2. Pearson 3	Correlation Sig. (2-tailed) N	.125 .329 63	.120 .350 63	1 63	.538** .000 63	-.077- .551 63	.462** .000 63	.255* .044 63	.510** .000 63
X2. Pearson 4	Correlation Sig. (2-tailed) N	.031 .808 63	.465** .000 63	.538** .000 63	1 63	.201 .115 63	.218 .086 63	.491** .000 63	.663** .000 63
X2. Pearson 5	Correlation Sig. (2-tailed) N	-.030- .814 63	-.232- .067 63	-.077- .551 63	.201 .115 63	1 63	.400** .001 63	-.057- .659 63	.276* .029 63
X2. Pearson 6	Correlation Sig. (2-tailed) N	.636** .000 63	.030 .813 63	.462** .000 63	.218 .086 63	.400** .001 63	1 63	.448** .000 63	.788** .000 63
X2. Pearson 7	Correlation Sig. (2-tailed) N	.206 .105 63	.382** .002 63	.255* .044 63	.491** .000 63	-.057- .659 63	.448** .000 63	1 63	.707** .000 63

TO Pearson														
TA Correlation	.620**	.531**	.510**	.663**	.276*	.788**	.707**	1						
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.029	.000	.000							
N	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63

C. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	X3.10	X3.11	X3.12	X3.13	TOTAL
X3. Pearson 1 Correlation Sig. (2-tailed) N		.745* * .000 63	.484* * .000 63	.266* * .035 63	.292* * .020 63	-.016 * .901 63	.490* * .000 63	.080 * .533 63	.156 * .222 63	.115 * .370 63	.219 * .085 63	.532* * .000 63	.169 * .185 63	.604* * .000 63
X3. Pearson 2 Correlation Sig. (2-tailed) N	.745* * .000 63		.449* * .000 63	.462* * .000 63	.281* * .026 63	.073 * .571 63	.531* * .000 63	.272* * .031 63	.052 * .688 63	-.053 * .678 63	.124 * .333 63	.516* * .000 63	.081 * .530 63	.608* * .000 63
X3. Pearson 3 Correlation	.484* * .000 63	.449* * .000 63		.772* * .000 63	.331* * .000 63	.267* * .000 63	.836* * .000 63	.481* * .000 63	.476* * .000 63	.345* * .000 63	.414* * .000 63	.426* * .000 63	.343* * .000 63	.889* * .000 63

X3. Pearson Correlation	.490*	.531*	.836*	.775*	.267*	.223	1	.539*	.407*	.129	.233	.281*	.340*	.819*
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.035	.080		.000	.001	.312	.067	.026	.006	.000
N	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
X3. Pearson Correlation	.080	.272*	.481*	.406*	-.173	.139	.539*	1	.485*	.201	.236	.125	.091	.492*
Sig. (2-tailed)	.533	.031	.000	.001	.175	.279	.000		.000	.114	.063	.328	.478	.000
N	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
X3. Pearson Correlation	.156	.052	.476*	.294*	.019	.334*	.407*	.485*	1	.352*	.361*	.159	.283*	.545*
Sig. (2-tailed)	.222	.688	.000	.020	.885	.008	.001	.000		.005	.004	.214	.025	.000
N	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
X3. Pearson Correlation	.115	-.053	.345*	.309*	.247	.455*	.129	.201	.352*	1	.238	.402*	.143	.460*
Sig. (2-tailed)	.370	.678	.006	.014	.051	.000	.312	.114	.005		.060	.001	.262	.000

N	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
X3. Pearson 11 Correlation	.219	.124	.414*	.174	-.035	.170	.233	.236	.361*	.238	1	.343*	.276*	.485*
Sig. (2-tailed)	.085	.333	.001	.171	.786	.182	.067	.063	.004	.060		.006	.029	.000
N	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
X3. Pearson 12 Correlation	.532*	.516*	.426*	.290*	.391*	.355*	.281*	.125	.159	.402*	.343*	1	.185	.645*
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.021	.002	.004	.026	.328	.214	.001	.006		.147	.000
N	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
X3. Pearson 13 Correlation	.169	.081	.343*	.105	-.009	.099	.340*	.091	.283*	.143	.276*	.185	1	.418*
Sig. (2-tailed)	.185	.530	.006	.414	.944	.441	.006	.478	.025	.262	.029	.147		.001
N	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
TO Pearson TA L Correlation	.604*	.608*	.889*	.766*	.450*	.459*	.819*	.492*	.545*	.460*	.485*	.645*	.418*	1

Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	
N	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63

D. AKUNTABILITAS

	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	Y.11	TOTAL
Y.1 Pearson Correlation	1	.529*	-.080	-.169	-.073	.231	.040	-.047	.001	.210	.169	.329**
Sig. (2-tailed)		.000	.534	.185	.571	.068	.754	.714	.991	.099	.185	.008
N	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Y.2 Pearson Correlation	.529**	1	-.017	-.106	-.189	.187	.223	-.043	-.037	.198	.266*	.365**
Sig. (2-tailed)	.000		.892	.409	.139	.141	.080	.737	.773	.120	.035	.003
N	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Y.3 Pearson Correlation	-.080	-.017	1	.621**	.416*	-.067	.290*	.556*	.387*	.207	-.020	.574**
Sig. (2-tailed)	.534	.892		.000	.001	.602	.021	.000	.002	.103	.878	.000
N	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Y.4 Pearson Correlation	-.169	-.106	.621*	1	.389*	-.010	.073	.675*	.419*	.308*	.118	.579**
Sig. (2-tailed)	.185	.409	.000		.002	.937	.569	.000	.001	.014	.357	.000
N	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Y.5 Pearson Correlation	-.073	-.189	.416*	.389**	1	-.097	-.043	.257*	.153	.144	.027	.321*

Sig. (2-tailed)	.571	.139	.001	.002		.448	.740	.042	.233	.260	.835	.010
N	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Y.6 Pearson Correlation	.231	.187	-.067*	-.010-	-.097-	1	.449*	.108	.472*	.467*	.561*	.593**
Sig. (2-tailed)	.068	.141	.602	.937	.448		.000	.400	.000	.000	.000	.000
N	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Y.7 Pearson Correlation	.040	.223	.290*	.073	-.043-	.449*	1	.304*	.236	-.053-	.009	.433**
Sig. (2-tailed)	.754	.080	.021	.569	.740	.000		.016	.063	.681	.947	.000
N	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Y.8 Pearson Correlation	-.047-	-.043-	.556*	.675**	.257*	.108	.304*	1	.390*	.443*	-.078-	.627**
Sig. (2-tailed)	.714	.737	.000	.000	.042	.400	.016		.002	.000	.543	.000
N	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Y.9 Pearson Correlation	.001	-.037-	.387*	.419**	.153	.472*	.236	.390*	1	.257*	.288*	.682**
Sig. (2-tailed)	.991	.773	.002	.001	.233	.000	.063	.002		.042	.022	.000
N	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Y.10 Pearson Correlation	.210	.198	.207	.308*	.144	.467*	-.053-	.443*	.257*	1	.353*	.626**
Sig. (2-tailed)	.099	.120	.103	.014	.260	.000	.681	.000	.042		.005	.000
N	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Y.11 Pearson Correlation	.169	.266*	-.020-	.118	.027	.561*	.009	-.078-	.288*	.353*	1	.476**

Sig. (2-tailed)	.185	.035	.878	.357	.835	.000	.947	.543	.022	.005		.000
N	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
TO Pearson												
TA Correlati	.329**	.365*	.574*	.579**	.321*	.593*	.433*	.627*	.682*	.626*	.476*	1
L on												
Sig. (2-tailed)	.008	.003	.000	.000	.010	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
N	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63

UJI RELIABILITAS

A. KOMPETENSI PERANGKAT DESA

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	63	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	63	100.0

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.902	11

B. PARTISIPASI MASYARAKAT

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	63	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	63	100.0

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.668	7

C. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	63	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	63	100.0

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.851	13

D. AKUNTABILITAS

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	63	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	63	100.0

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.715	11

UJI ASUMSI KLASIK

A. UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		63
Normal Parameters ^a		
	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.24715501
Most Extreme Differences	Absolute	.124
	Positive	.098
	Negative	-.124
Kolmogorov-Smirnov Z		.987
Asymp. Sig. (2-tailed)		.284

B. UJI HETEROKEDASTITAS

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-5.109	4.053		-1.261	.212
	X1	-.018	.093	-.051	-.190	.850
	X2	-.032	.161	-.039	-.197	.844
	X3	.139	.107	.304	1.298	.199

a. Dependent Variable: LN_RES_2

C. UJI MULTIKOLINIERITAS

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-5.109	4.053		-1.261	.212		
	X1	-.018	.093	-.051	-.190	.850	.226	4.432
	X2	-.032	.161	-.039	-.197	.844	.418	2.394
	X3	.139	.107	.304	1.298	.199	.291	3.438

UJI HIPOTESIS

A. UJI T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	30.917	4.897		6.314	.000
	Kompetensi Perangkat Desa	.137	.113	.277	1.215	.229
	Partisipasi Masyarakat	.458	.195	.393	2.348	.022
	SPI	-.062	.130	-.096	-.478	.635

B. .KOEFSISIEN DETERMINASI

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.557 ^a	.310	.275	2.304

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Selinda Rahmaidah
2. Tempat & Tanggal Lahir : Brebes, 02 November 2000
3. Alamat Rumah : Desa Klikiran Rt 06/ Rw 02
Kecamatan Jatibarang, Kabupaten
Brebes Jawa Tengah
4. No HP : 085879154945
5. Email : selindarahma88@gmail.com
6. Nama Ayah : Rasdum
7. Pekerjaan : Buruh Tani
8. Nama Ibu : Komsiroh
9. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

B. Riwayat Pendidikan

- a. SDN Klikiran, lulus tahun 2012
- b. SMPN 2 Jatibarang, lulus tahun 2015
- c. SMKN 1 Brebes, lulus tahun 2018